



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan perkembangan dan teknologi;
 - b. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyusun klasifikasi arsip untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3906) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penempatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4718);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang dimuat di dalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan, penataan, dan penemuan kembali arsip.
8. Klasifikasi masalah adalah penggolongan arsip yang didasarkan atas isi masalah yang terdapat di dalam arsip.
9. Kode Klasifikasi Arsip adalah merupakan bagian dari klasifikasi arsip yang menjadi tanda pengenalan urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas di tempat penyimpanannya.
10. Kode Komponen adalah tanda pengenal komponen unit pengelola yang mengelola atau menangani naskah dinas dan ditulis dengan huruf ditempatkan dibelakang nomor urut.

11. Kode Pembantu adalah kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri yang merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya dan ditulis tambahan di belakang kode yang memerlukan perincian lebih lanjut.
12. Nomor Urut adalah nomor urut naskah dinas yang dimulai dengan angka 01 dan seterusnya sebagai sarana inventarisasi jumlah naskah dinas, meliputi permulaan tahun dan nomor urut dimulai kembali dengan angka 01.
13. Arsip Statuter adalah arsip yang terkait dengan peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah dan peraturan gubernur.
14. Indeks adalah kata tangkap yang akan dijadikan petunjuk dan pengenal untuk memudahkan penemuan kembali arsip.
15. Indeks Kaitan adalah indeks yang terdiri dari himpunan nama-nama masalah dan kaitannya yang terdapat dalam pola klasifikasi yang disusun dalam urutan abjad dengan diikuti kodenya.
16. Kartu Tunjuk Silang adalah kartu yang dipergunakan untuk memberi petunjuk tentang adanya lebih dari satu masalah pada satu naskah dinas dan sebagai sarana petunjuk tentang adanya hubungan dengan file yang lainnya.

Pasal 2

Tujuan pengaturan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah penggolongan arsip yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penunjuk terhadap letak berkas di tempat penyimpanannya.

Pasal 3

Ruang lingkup Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi:

- a. 000 Umum;
- b. 100 Pemerintahan;
- c. 200 Keamanan;
- d. 300 Keamanan/Ketertiban;
- e. 400 Kesejahteraan Rakyat;
- f. 500 Perekonomian;
- g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
- h. 700 Pengawasan;
- i. 800 Kepegawaian; dan
- j. 900 Keuangan.

Pasal 4

Klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan rinciannya tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 April 2020

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

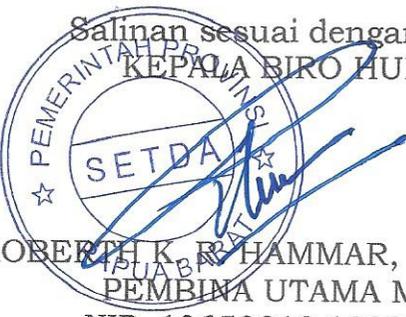
Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 2 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DR. ROBERT H. K. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA BARAT

A. BENTUK DAN SUSUNAN POLA KLASIFIKASI

1. Klasifikasi kearsipan ini berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi. Klasifikasi disusun berdasarkan masalah pemerintahan yang mencerminkan fungsi dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, diberi kode dengan angka Arab, diperinci Desimal dengan mempergunakan Tiga Angka Dasar, dilengkapi dengan kode pembantu dan singkatan nama komponen.
2. Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang dari umum ke khusus. Dalam kaitan klasifikasi masalah didahului dengan perincian dasar yaitu perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai penghubung dalam menentukan kode masalah pemerintahan yang tercantum dalam pola klasifikasi.
3. Angka 100 sampai dengan 700 merupakan kode tugas substantif, sedangkan angka 800 dan 900 merupakan kode tugas fasilitatif, kode 000 menampung masalah-masalah fasilitatif di luar kepegawaian dan keuangan, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumah tanggaaan, seperti protokol urusan dalam dan masalah yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas, pengadaan peralatan, kerja sama, lambang daerah, tanda kehormatan dan sebagainya.
4. Dengan demikian maka sepuluh pokok urusan tersebut telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah Provinsi termasuk Organisasi Perangkat Daerah. Sepuluh pokok urusan tersebut di atas meliputi:
 - 000 Umum
 - 100 Pemerintahan
 - 200 Politik
 - 300 Keamanan dan Ketertiban
 - 400 Kesejahteraan
 - 500 Perekonomian
 - 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
 - 700 Pengawasan
 - 800 Kepegawaian
 - 900 Keuangan
5. Kode pembantu merupakan penjelasan dari masalah tertentu yang merupakan aspek pendukung untuk menjelaskan masalah utamanya, yang diletakan di belakang tiap kode yang memerlukan perincian lebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip. Kode pembantu tersebut di atas adalah:
 - 01 Perencanaan
 - 02 Penelitian
 - 03 Pendidikan
 - 04 Laporan
 - 05 Panitia
 - 06 Seminar, Lokakarya, Workshop
 - 07 Statistik
 - 08 Peraturan Perundang-Undangan

09 dan seterusnya

6. Untuk mengetahui unit yang menangani masalah pemerintahan, diperlukan kode dan singkatan nama unit untuk Pemerintah Daerah Provinsi, diatur sebagai berikut:

Sekretariat Daerah	Setda
Asisten Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Khusus	Ass I
Asisten Bidang Kesejahteraan dan Pembangunan	Ass II
Asisten Bidang Administrasi	Ass III
Biro Pemerintahan	Biro Pem
Biro Hukum	RoKum
Biro Humas dan Protokol	Humas
Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Otsus
Biro Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Rakyat	Mental
Biro Administrasi Pembangunan	Adbang
Biro Perekonomian dan Kerja Sama	Biro Ekonomi
Biro Umum	Biro Umum
Biro Organisasi	Biro Organisasi
Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan	Bplp
Sekretariat DPRD	DPR
Dinas Pendidikan	Disdik
Dinas Kesehatan	Dinkes
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dpupr
Dinas Sosial	Dinsos
Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Disdukcapilkb
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Distransnaker
Dinas Ketahanan Pangan	Diskepang
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Dtphp
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinnakkeswan
Dinas Perhubungan	Dishub
Dinas Kehutanan	Dishut
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Dlht
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinkopukm
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Dpmk
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dispppa
Dinas Kelautan dan Perikanan	Dkp
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Esdm
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dispora
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Disbudpar
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	

Terpadu Satu Pintu	Dpmpptsp
Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Diskominfoperstatik
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Disperindag
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Disarpus
Inspektorat	Inspt
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Balitbangda
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bpkad
Badan Pendapatan Daerah	Bapenda
Badan Kepegawaian Daerah	Bkd
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Bpsdm
Badan Penghubung Daerah	Penghubung
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bpbd
Satuan Polisi Pamong Praja	Satpolpp
Rumah Sakit Jiwa	RSJ
Rumah Sakit Paru	RSP
Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan	RS Ihsan
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia daerah	Set KPID
Sekretariat KORPRI	Set KORPRI
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan	
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Set BAKORLUH

B. PERINCIAN KODE KLASIFIKASI DAN INDEKS KAITAN.

1. Perincian Pertama :

000	Umum
100	Pemerintahan
200	Politik
300	Keamanan/Ketertiban
400	Kesejahteraan Rakyat
500	Perekonomian
600	Pekerjaan Umum dan ketenagaan
700	Pengawasan
800	Kepegawaian
900	Keuangan

2. Perincian Kedua :

000	UMUM
010	Urusan Dalam
020	Peralatan
030	Kekayaan Daerah
040	Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan/Sandi
050	Perencanaan
060	Organisasi / Ketatalaksanaan
070	Penelitian

080	Konfrensi
090	Perjalanan Dinas
100	PEMERINTAHAN
110	Pemerintah Pusat
120	Pemerintahan Provinsi
130	Pemerintahan Kabupaten / Kota
140	Pemerintahan Desa / Kelurahan
150	DPR / MPR
160	DPRD Provinsi
170	DPRD kabupaten / Kota
180	Hukum
190	Hubungan Luar Negeri
200	POLITIK
210	Kepartaian
220	Organisasi Kemasyarakatan
230	Organisasi Profesi dan Fungsional
240	Organisasi Pemuda
250	Organisasi Buruh, Tani dan Nelayan
260	Organisasi Wanita
270	Pemilihan Umum
280	Komisi Pemilihan Umum
290	Badan pengawasan Pemilu
300	KEAMANAN / KETERTIBAN
310	Pertanahan
320	Kemiliteran
330	Keamanan
340	Pertahanan Sipil
350	Kesejahteraan
360	Bencana
370	Kecelakaan
380	-
390	-
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
410	Jaring pengaman Sosial
420	Pendidikan
430	Kebudayaan
440	Kesehatan
450	Agama
460	Sosial
470	Kependudukan
480	Media Massa
490	-
500	PEREKONOMIAN
510	Perdagangan
520	Pertanian
530	Perindustrian
540	Pertambangan Kesamudraan
550	Perhubungan
560	Tenaga Kerja

570	Permodalan
580	Perbankan / Moneter
590	Agraria
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
610	Pengairan
620	Jalan
630	Jembatan
640	Bangunan
650	Tata Kota
660	Tata Lingkungan
670	Ketenagaan
680	Peralatan
690	Air Minum
700	PENGAWASAN
710	Bidang pemerintahan
720	Bidang Politik
730	Bidang Keamanan / Ketertiban
740	Bidang Kesejahteraan Rakyat
750	Bidang Perekonomian
760	Bidang Pekerjaan Umum
770	-
780	Bidang Kepegawaian
790	Bidang keuangan
800	KEPEGAWAIAN
810	Pengadaan
820	Pengangkatan dan Mutasi
830	Kedudukan
840	Kesejahteraan
850	Cuti
860	Penilaian
870	Tata Usaha
880	Pemberhentian
890	Pendidikan
900	KEUANGAN
910	Anggaran
920	Otoritas
930	Verifikasi
940	Pembukuan
950	Perbendaharaan
960	Pembinaan Kebendaharaan
970	Pendapatan
980	-
990	Bendaharawan

KLASIFIKASI ARSIP
Perincian Ketiga
000 UMUM

- 000 UMUM
- 001 Lambang
 - .1 Garuda
 - .2 Bendera Kebangsaan
 - .3 Lagu Kebangsaan
 - .4 Daerah
 - .41 Provinsi
 - .42 Kabupaten / Kota
 - .5 LPND
 - .6 Lembaga Lainnya
- 002 Tanda Kehormatan / Penghargaan (Untuk Pegawai Lihat Hal.
861. 10)
 - .1 Bintang
 - .2 Setyalencana
 - .3 Prasamnya Purna Karya Nugraha
 - .4 Monumen
 - .5 Penghargaan Secara Adat
 - .6 Penghargaan Lainnya
- 003 Hari Raya / Besar
 - .1 nasional 17 Agustus, hari Pahlawan dan Sebagainya
 - .2 Hari Raya Keagamaan
 - .3 Hari Ulang Tahun
 - .4 Hari- hari Besar Internasional
- 004 Ucapan
 - .1 Ucapan Terima Kasih
 - .2 Ucapan Selamat
 - .3 Ucapan Belasungkawa
 - .4 Ucapan- ucapan Lainnya
- 005 Undangan
- 006 Tanda Jabatan
 - .1 Pamong Praja
 - .2 Tanda Pengenal
 - .3 Pejabat Lainnya
- 007 -
- 008 -
- 009 -
- 010 URUSAN DALAM
 - Gedung kantor / Termasuk Instalasi prasarana Fisik
- 011 Kantor / Dinas
 - .1 Prasarana Fisik Pamong Praja / Kantor Dinas
- 012 Rumah Dinas
 - .1 Tanah Untuk Rumah Dinas
 - .2 Prabot Rumah Tangga
 - .3 Rumah Dinas Golongan I
 - .4 Rumah Dinas Golongan II
 - .5 Rumah Dinas Golongan III

- .6 Rumah / Bangunan Lainnya
- .7 Rumah Pejabat Negara
- 013 Mess / Guest House / Panti / Wisma / Rumah Susun / Apartemen
- 014 Jasa Air
- 015 Penerangan Listrik / Jasa Listrik
- 016 Jasa Telepon / Faximile / Internet
- 017 Jasa Keamanan
- 018 Jasa Kebersihan Kantor
- 019 Protokol
 - .1 Upacara Bendera
 - .2 Tata Tempat
 - .21 Pemasangan gambar Presiden, Wakil Presiden
 - .22 Pemasangan gambar Gubernur, Wakil Gubernur
 - .23 Pemasangan gambar Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota
 - .3 Audiensi menghadap pimpinan
 - .4 Alamat- alamat kantor dan pejabat
 - .5 Bandi / umbul- umbul, spanduk
 - .6 Launching
- 020 PERALATAN KANTOR
 - .1 Penawaran
- 021 Alat Tulis kantor
- 022 Mesin Kantor
- 023 Perabot kantor
- 024 Alat angkutan / kendaraan Dinas
- 025 Pakaian Dinas
- 026 Senjata / Alat Pengaman Kantor
- 027 Pengadaan Barang / Jasa
 - .1 Penunjukan Langsung
 - .2 Pemilihan Langsung
 - .3 Seleksi
 - .4 Lelang
- 028 Inventaris
- 029 -
- 030 KEKAYAAN DAERAH
- 031 Sumber Daya Alam
- 032 Asset Daerah
- 033 Pemanfaatan Kekayaan Daerah
- 034 Pengamanan Kekayaan Daerah
- 035 Penghapusan Asset
- 036 Kekayaan Lainnya
- 037 Bangunan
- 038 -
- 039 -
- 040 PERPUSTAKAAN / DOKUMENTASI / KEARSIPAN / SANDI
- 041 Perpustakaan
 - .1 Umum
 - .2 Khusus

- .3 Perguruan Tinggi
- .4 sekolah
- .5 Keliling
- .6 Pengadaan Bahan Pustaka
- .7 Pelayanan
- .8 Pemeliharaan
- 042 Dokumentasi
- 043 Jaringan
 - .1 LAN
 - .2 WAN
- 044 -
- 045 Kearsipan
 - .1 Pola Klasifikasi
 - .2 Penataan Berkas
 - .3 Penyusutan
 - .31 Jadwal Retensi Arsip
 - .32 Pemindahan
 - .33 Penyerahaan
 - .34 Pemusnaan
 - .4 Pengelolaan Arsip Dinamis
 - .41 Arsip Aktif
 - .42 Arsip Inaktif
 - .43 Arsip Vital
 - .5 Pengelolaan Arsip Statis
 - .51 Akuisisi
 - .52 Pengelolaan
 - .53 Preservasi
 - .54 Akses Arsip Statis
 - .6 Pembinaan
- 046 Sandi
- 047 *Website*
- 048 Pengelolaan Data Elektronik
- 049 Jaringan Komunikasi Data
- 050 PERENCANAAN
- 051 Bidang Pemerintahan
- 052 Bidang Politik
- 053 Bidang keamanan / Ketertiban
- 054 Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 055 Bidang Perekonomian
- 056 Bidang Pekerjaan Umum
- 057 Bidang Pengawasan
- 058 Bidang Kepegawaian
- 059 Bidang Keuangan
- 060 ORGANISASI KETATALAKSANAAN
- 061 Organisasi Perangkat Daerah / Instansi Pemerintah
 - .1 Susunan Organisasi Tata Kerja
 - .2 Tata Tertib Kantor
- 062 Organisasi / badan Non Pemerintah
- 063 Organisasi / Badan Internasional

- 064 Organisasi/ Badan Semi Pemerintah
- 065 Ketatalaksanaan
 - .1 Tata naska Dinas
 - .2 Stempel
 - .21 Stempel Jabatan
 - .22 Stempe Dinas
 - .3 Papan nama Instansi pemerintah / Non Pemerintah
 - .4 Organisasi yang diubah, digabung dan dihapus / Likuidasi
- 066 Tata Hubungan Kerjas
 - .1 Telaah Tata Hubungan
 - .2 Penyusunan
 - .3 Bimbingan
- 067 Pelayanan Umum / Pelayanan Publik / Analisis
- 068 Standar Pelayanan Minimal
- 069 Analisis Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja
 - .1 Analisis Jabatan
 - .2 Hasil Analisis Jabatan
 - .3 Penilaian Jabatan Struktural dan Fungsional
- 070 PENELITIAN
- 071 Riset
- 072 Survey
- 073 Kajian
- 075 Kerja sama penelitian dengan Perguruan Tinggi dan Instansi lain
- 076 Kerja sama penelitian dengan Kementerian lainnya
- 077 Kerja sama Penelitian dengan Pemerintahan Daerah Lainnya
- 078 Rekomendasi Penelitian
- 079 Penempatan / Ekspose
- 080 KONFRENSI / RAPAT / SEMINAR
- 081 Gubernur
- 082 Bupati . Walikota
- 083 Komponen Eselon Lainnya
- 084 Instansi Lainnya
- 085 Internasional di dalam negeri
- 086 Insternasional di luar negeri
- 087 -
- 088 -
- 089 -
- 090 PERJALANAN DINAS
- 091 Perjalanan Presiden /Wakil Presiden di dalam Negeri
- 092 Perjalanan Menteri di Dalam Negeri
- 093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)
- 094 Perjalanan Pegawai termasuk pemanggilan Pegawai
- 095 Perjalanan Tamu Asing ke daerah
- 096 Perjalanan Gubernur / Wakil gubernur ke Luar Negeri
- 097 Perjalanan Pejabat Daerah ke Luar Negeri
- 098 Perjalanan Pejabat Negara dan ke Luar Negeri
- 099 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri

PEMERINTAHAN

- 100 PEMERINTAHAN
Meliputi : Tata Praja, Legislatif, Hubungan Luar
- 101 Bentuk Pemerintahan
- 102 Sistem pemerintahan
- 103 -
- 104 -
- 105 -
- 106 -
- 107 -
- 108 -
- 109 -
- 110 PEMERINTAH PUSAT
- 111 Presiden
Meliputi : Pencalonan, pengangkatan, Pelantikan, sumpah, serah terima Jabatan, Pemberhentian, dan sebagainya.
- .1 Pertanggung Jawaban Presiden
- .2 Amanat Presiden / Amanat kenegaraan
- 112 Wakil Presiden
Meliputi : Pencalonan, pengangkatan, Pelantikan, Sumpah serah Terima jabatan, pemeberhentian, dan sebagainya
- 113 Susunan Kabinet
- .1 Reshuffle
- .2 Penunjukan Menteri Ad .Interim
- .3 Sidang Kabinet
- 114 Kementerian Dalam Negeri
Meliputi : Pengangkatan, pelantiakn, sumpah dan serah terima Jabatan
- .1 Amanat Menteri Dalam Negeriss
- 115 Kementerian Departemen Lainnya
Meliputi : Pengangakatn, Pelantikan, sumpag dan serah terima Jabatan
- .1 Amanat Menteri Lainnya
- 116 Lembaga Tinggi Negara
Meliputi : Pengangakatan, Pelantikan, sumpah dan serah terima Jabatan
- 117 Lembaga Pemerintah Non Kementrian
- 118 Otonomi Daerah / Desentrilisasi / dekonsentrasi
- 119 Kerja sama antara Departen
- 120 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
- .04 Laporan Daerah, tambahkan kode wilayah
- .042 Monografi, tambakan kode wilayah
- .1 Koordinasi
- .2 Instansi Provinsi
- .21 Organisasi Perangkat Daerah
- .22 Instansi Vertikal
- .3 Kerja sama antar Provinsi

- 121 Gubernur, tambakan kode Wilayah
Meliputi, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, serah terima
Jabatan, dsb
.1 Sambutan / pengarahan / Amanat Gubernur
- 122 Wakil Gubernur, tambakan kode wilayah
Meliputi ; pencalonan, pengangkatan, pelantikan, serah terima
Jabatan, dsb
- 123 Sekretaris Daerah Provinsi, tambakan kode wilayah
Meliputi : pencalonan, serah terima jabatan
- 124 Pembentukan / pemekaran wilayah
.1 Pembentukan Daerah Otonomi
.2 perubahan Batas Wilayah
.3 Pemekaran Wilayah
.4 Penambahan Ibukota Provinsi, Pemberian dan penggantian
nama kota, Daerah, gunung, sungai, pulau, selat, jalan dan
sebagainya
- 125 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah
.1 Pemerintah provinsi
.2 panitia Anggaran Provinsi
.3 Seminar, Lokakarya dan lainnya
- 126 Pembagian Wilayah
- 127 Otonomi Daerah
- 128 Swapraja / Penataan Wilayah / Daerah
- 129 Tugas Pembantuan
- 130 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
.04 Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
.1 Koordinasi
.2 Instansi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
.21 Dinas Otonom
.23 Instansi Vertikal
.3 Kerjasama antar Kabupaten / Kota
- 131 Bupati / Walikota, tambahkan kode wilayah
Meliputi : Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, serta
Serah terima jabatan, pemberhentian, dan sebagainya
.1 Berita acara jabatan dan memori Bupati / Walikota
.2 Sambutan / pengarahan / amanat / Bupati / walikota
- 132 wakil Bupati / walikota, tambakan kode wilayah
Meliputi : pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, serah
Terima jabatan, pemberhentian, dan sebagainya
- 133 Sekretaris Daerah Kabupaten / kota, tambakan kode wilayah
Meliputi : Pencalonan, pengangkatan, Pelantikan , sumpah, serah
Terima jabatan, pemberhentian, dan sebagainya
- 134 Forum Koordinasi pemerintah di Daerah
.1 MUSPIDA
.2 Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional)
.3 Forum Koordinasi lainnya
.4 Kerja sama antara kabupaten / kota
- 135 Pembentukan / pemekaran wilayah

- .1 Pembentukan Daerah Otonom
- .2 Perubahan Batas wilayah
- .3 Pemekaran Wilyah
- .4 Permasalahan Batas wilayah
- .5 Pemindahan ibukota kabupatetem / kota
- .6 Pemberian dan penggantian
- .7 Pemetaan Wilayah
- 136 Pembagian Wilayah
- 137 Penyerahan Urusan / Otonomi Daerah / Otonomi Khusus
- 138 Pemerintahan kecamatan
 - .1 Sambutan/ pengarahan / Amanat camat
 - .2 Pembentukan Kecamatan
 - .3 Pemekaran
 - .4 Perluasan / perubahan batas kecamatan
 - .5 Pemindahan ibukota kecamatan
- 139 Likuidasi Dinas / Badan / lembaga provinsi dan kabupaten / kota
- 140 PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN
- 141 Pemerintahan Desa
 - .1 Kepala Desa
Meliputi : Pencalonan, Pengangkatan, pelantikan, sumpah, serah Terima jabatan, pemberhentian, dan sebagainya
 - .2 Badan Perwakilan Desa
Meliputi : Pembentukan, Keanggotaan, Kepengurusan dan kegiatan BPD
 - .3 Pengangkatan Desa
 - .31 Sekretaris Desa
Meliputi : pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, Pemberhentian sementara
 - .32 Kepala Dusun
Meliputi : pencalonan, penyeleksian, pengangkatan Pemberhentian sementara.
 - .33 Kepala Urusan
- 142 APPKD (Anggaran pendapatan Pengeluaran keuangan Desa)
 - .1 Rutin (termasuk pengasilan pamong praja)
 - .2 Pembangunan
 - .3 Anggran belanja tambahan
 - .4 Pendapatan Desa
 - .41 UrusanDesa
 - .42 Penerima yang berasal dari Pemerintah Pusat
 - .43 Penerima yang berasal dari pemerintah Provinsi
 - .44 Penerima yang berasaql dari Pemerintah Kabupaten / Kota
 - .45 penerima yang berasal dari pajak dan Retribusi Daerah yang Diserahkan kepada Desa
 - .46 Penerima dari pemilik- pemilik tanah yang berdomisili di luar Desa
 - .47 Pendapatan Asli Desa

- .48 Penerimaan Lain-lain yang sah berdasarkan peraturan
- .49 Perundang- undangann yang berlaku
- .49 Hasil dari gotong royong masyarakat
- 143 Kekayaan Desa
 - .1 Tanah Hak Pakai Desa
 - .11 Tanah Bengkok
 - .12 Tanah Titisara
 - .13 Tanah Pengangonan
 - .14 Tanah Desa Lainnya
 - .2 Jalan Desa
 - .3 Bangunan Desa
 - .4 Kekayaan Desa Lainnya
- 144 Lembaga- lembaga Desa
 - .1 LMD / BPD
 - .2 LKMD / LPM
- 145 Administrasi Desa
- 146 Kewilayahan
 - .1 Pembentukan Desa / Kelurahan
 - .2 Pemekaran Desa / Kelurahan
 - .3 Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan
 - .4 Perubahan nama Desa / kelurahan
 - .5 Permasalahan Batas Desa
 - .6 Penyatuan Desa / kelurahan
 - .7 penghapusan Desa / Kelurahan
- 147 Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan Desa
 - .1 Pembinaan usaha gotong royong
 - .11 swadaya gotong royong
 - .111 Penataan gotong royong
 - .112 Gotong royong dinamis
 - .113 Gotong royong statis
 - .114 Pungutan
 - .12 Lembaga Sosial
 - .121 Pembinaan
 - .122 Klasifikasi
 - .123 Proyek
 - .124 Musyawarah
 - .13 Latihan Kerja Masyarakat
 - .131 Kader masyarakat
 - .132 Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - .133 Pusat Latihan
 - .134 Kursus- kursus
 - .135 Kurikulum / silabus
 - .136 Ketrampilan
 - .137 Pramuka
 - .14 Pembinaan kesejahteraan Keluarga
 - .141 Program
 - .142 Pembinaa Organisasi
 - .143 Kegiatan

.15	Penyuluhan
.151	Publikasi
.152	Peragaan
.153	Sosio Drama
.154	Siaran Pedesaan
.155	Penyuluhan Lapangan
.16	Kelembagaan
.161	Kelompok Tani
.162	Rukun Tani
.163	Subak
.164	Dharma Tirta
.165	Mitra Cai
.2	Perekonomian Desa
.21	Produksi Desa
.211	Pengelolaan
.212	Pemasaran
.222	Inventaris Desa
.223	Perkembangan / Pelaksanaan
.224	Bantuan / Simulasi
.225	Pejuntuk / pembinaan pelaksana
.23	Koperasi Desa
.231	Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
.232	Koperasi Unit Desa (KUD)
.24	Penataan Bantuan Pembangunan Desa
.241	Jumlah Desa yang diberi bantuan
.242	pengarahan
.243	Pusat
.244	Daerah
.25	Alokasi bantuan Pembangunan desa
.251	Pusat
.252	Daerah
.26	Pelaksana Bantuan Pembangunan Desa
.261	Bantuan Langsung
.262	Bantuan Keserasian
.263	Bantuan Juara Lomba Desa
.3	Prasarana Desa
.31	Pembinaan
.331	Lokasi
.332	Diskusi
.333	Pelaksanaa
.34	Masyarakat Pra Desa
.341	Pembinaan
.342	Penyuluhan
.35	Pemugaran perumahan dan Lingkungan Desa
.351	Rumah Sehat
.351	Proyek perintis
.353	Pelaksanaan
.354	Pengembangan
.355	Perbaikan Kampung

- .4 Pembangunan Desa
- .41 Tingkat Perkembangan Desa
- .411 Jumlah Desa
- .4112 Pemekaran Desa
- .4113 Pembentukan Desa Baru
- .4114 Evaluasi
- .4115 Bangunan
- .42 Unit Daerah Kerja Bangunan (UDKP)
- .421 Penyusunan Program
- .422 Lokasi UDKP
- .423 Pelaksanaan
- .424 Bimbingan / Pembinaan
- .425 Evaluasi
- 43 Tata Desa
- .431 Inventarisasi
- .432 Penyusunan Pola Tata Desa
- .433 Aplikasi Tata Desa
- .434 Evaluasi
- .44 Perlombaa Desa
- .441 Pedoman perlombaan Desa
- .442 Penilaian
- .443 Kejujuran
- .444 Piagam
- .5 Koordinasi
- .51 Sektor khusus (K)
- .52 Rapat koordinasi Horizontal (RKH)
- .53 Team koordinasi Pusat
- .54 Kerja Sama
- .541 Luar Negeri
- .542 Perguruan Tinggi
- .543 Departemen / Lembaga Non Departemen
- 148 Pemerintahan Kelurahan
- .1 Kepala kelurahan meliputi : Pengangkatan, pemberhentian, dan Pemberhentian sementara
- .2 Sekretaris Kelurahan Meliputi : pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian sementara.
- .3 Kepala Lingkungan Meliputi : Pengangkatan, pemberhentian, dan Pemberhentian sementara.
- .4 Administrasi Kelurahan
- .5 Lembaga-lembaga tingkat kelurahan
- 148 Lembaga Kelurahan
- .1 Rukun Tetangga
- .2 Rukun Warga
- 150 MPR / DPR / DPD
- 151 Keanggotaan MPR
- .1 Pencalonan
- .2 Pengangkatan
- .3 Pemberhentian
- .31 Recall

- .32 Meninggal
- .4 Penggantian Antar waktu
- .5 Pelanggaran
- 152 Presiden MPR
- 153 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 154 Hak / saran / pendapat MPR
- 155 keanggotaan DPR / DPD
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .31 Recall
 - .32 Meninggal
 - .4 Pergantian Antar Waktu
 - .5 Pelanggaran
- 156 Presiden DPR / DPD
 - .1 Sidang Pleno
 - .2 Dengar Pendapat
 - .3 Rapat Komisi
 - .4 Reses
 - .5 Rapat Fraksi
- 157 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 158 Jawaban Pemerintah
- 159 Hak DPR
 - .1 Amandemen
 - .2 Angket
 - .3 Budget
 - .4 Interplasi
- 160 DPR PROVINSI
- 161 Keanggotaan
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .31 Recall
 - .32 Meninggal
 - .4 Pelanggaran
- 162 Persidangan
 - .1 Tata Tertib
 - .2 Sidang Pleno
 - .3 Dengar Pendapat / Hearing / Dialog
 - .4 Rapat- rapat meliputi : Rapat panitia musyawara, komisi, Fraksi, Panitia khusus, panitia anggaran dan sebagainya
 - .5 Reses
 - .6 Peninjauan Studi Banding
 - .7 Kunjungan Kerja
- 163 Kesejahteraan

- .1 Keuangan
- .11 Gaji / Honor
- .12 Tunjangan
- .2 Penghargaan
- 164 Hak DPR
 - .1 Budget
 - .2 Interplasi
 - .3 Amandemen
 - .4 Angket
 - .5 lainnya
- 165 Sekretaris DPRD
- 166 Alat Kelengkapan Dewan
 - .1 Badan Anggaran
 - .2 Badan Kehormatan
 - .3 Fraksi
 - .4 Lainnya
- 167 Tenaga Ahli DPRD
- 168 -
- 169 -
- 170 DPR KABUPATEN KOTA
- 171 Keanggotaan
 - .1 pencalonan
 - .2 Perangkat
 - .3 Pemberhentian
 - .31 Recall
 - .32 Meninggal
 - .4 Pelanggaran
- 172 Persidangan
 - .1 Tata Tertib
 - .2 Sidang Pleno
 - .3 Dengar Pendapat
 - .4 Rapat- rapat meliputi : rapat panitia, Musyawara, komisi, Fraksi Panitia anggaran dan sebagainya.
 - .5 Reses
 - .6 Peninjauan Studi Banding
- 173 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 174 Hak / Saran / Pendapat
- 175 Sekretaris DPRD Kabupaten / Kota
- 176 -
- 177 -
- 178 -
- 179 -
- 180 HUKUM
 - .1 Konsitusi
 - .11 Dasar Hukum
 - .12 Undang- undang Dasar
 - .2 Amandemen

- .3 Amnesti / Abolisi / Grasi
- 181 Perdata
 - .1 Perdata
 - .2 Rumah
 - .3 Utang /Piutang
 - .31 Gadai
 - .32 Hipotik
 - .4 Notaris
- 182 Pidana
 - .1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 183 Peradilan
 - .1 Jenis- jenis Peradilan
 - .11 Peradilan Umum
 - .111 Peradilan Negeri Tingkat Pertama
 - .112 Pengadilan Tinggi
 - .113 Mahkamah Agung
 - .114 Mahkamah Konstitusi
 - .12 Peradilan Agama Islam
 - .121 Peradilan Agama Islam Tingkat Pertama
 - .122 Pengadilan Tinggi Agama Islam
 - .123 Mahkamah Agung Agama Islam
 - .13 Peradilan Militer
 - .131 Mahkamah militer Tingkat Pertama
 - .132 Mahkamah Militer Tinggi
 - .133 Mahkamah Militer Agung
 - .14 Peradilan Tata Usaha Negara
 - .141 Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
 - .142 Peradilan Tata Usaha Negara Tinggi
 - .143 Peradilan Tata Usaha Negara Agung
 - .15 Peradilan Koneksitas
 - .2 Upaya- upaya Hukum
 - .21 Banding
 - .22 Kosasi
 - .23 Derden Verzet
 - .24 Peninjauan Kembali
 - .3 Eksekusi
 - .31 Penyitaan Lahan / Bangunan
 - .4 Pembinaan Hukum
 - .41 Pembinaan Kesadaran Hukum (KADARKUM)
 - .5 Bantuan Hukum
 - .51 Lembaga Bantuan Hukum
- 184 Hukum Internasional
- 185 Imigrasi
 - .1 Visa
 - .2 Paspor
 - .3 Exit / Permit
 - .4 Reentry
 - .5 Lintas Batas / Batas antar Negara

- 186 Kepenjaraan / Lembaga Permasayarakatan
- 187 Kejaksaan
 - .1 Saksi
 - .2 Terdakwa
- 188 Peraturan Perundang- undangan
 - .1 Tap MPR
 - .2 Undang- undang
 - .3 Peraturan
 - .31 Peraturan Pemerintah
 - .32 Peraturan Menteri
 - .33 Peraturan Lembaga Non Departemen
 - .34 Peraturan Daerah
 - .341 Peraturan Daerah Provinsi
 - .342 peraturan Daerah Kabupaten / Kota
 - .4 Keputusan
 - .41 Presiden
 - .42 Menteri
 - .43 Lembaga Non Departemen
 - .44 Gubernur
 - .45 Bupati / walikota
 - .5 Instruksi
 - .51 Presiden
 - .52 Menteri
 - .53 Lembaga Non Departemen
 - .54 Gubernur
 - .55 Bupati / walikota
- 189 Hukum Adat
 - .1 Tokoh Adat / Masyarakat
- 190 HUBUNGAN LUAR NEGERI
- 191 Perwakilan Asing
- 193 Kerjasama Deangan Negara Asing
 - .1 Bilateral
 - .2 Mutilateral
 - .3 Regional (ASEAN)
 - .4 Internasional
- 194 Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri
 - .1 Kedutaan
 - .2 Konsulat
 - .3 Kuasa Usaha
 - .4 Atases
- 195 PBB
 - .1 UNESCO
 - .2 UNICEF
 - .3 FAO
 - .4 UNHCR
 - .5 WHO
 - .6 Organisasi Lainnya
- 196 Laporan Luar Negeri
- 197 Hutang Luar Negeri (PHLN) LOAN

200
POLITIK

- 200 POLITIK
- 201 Kebijakan Umum
- 202 Orde Lama (1945- 1965)
- 203 Orde baru (1966- 200)
- 204 Orde Reformasi (2001- 2004)
- 205 Orde Persatuan (2004)
- 206 Politik Dalam Negeri
- 207 Kewaspadaan Nasional
- 208 -
- 209 -
- 210 KEPARTAIAN
- 211 Lembaga Partai
- 212 Kartu Tanda Anggota
- 213 Bantuan Keuangan Parpol
- 214 Program Partai
- 215 AD / ART
- 216 Pengurus Partai
 - .1 Pimpinan Pusat
 - .2 Pimpinan Wilayah
 - .3 Pimpinan Cabang
 - .4 Pimpinan Anak Cabang
 - .5 Pimpinan Ranting
- 217 Pertemuan Partai
 - .1 Muktamar
 - .2 Munas
 - .3 Kongres
- 218 Kaderisasi Partai
- 219 Pembinaan Parpol
- 220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- 221 Ormas Berdasarkan Perjuangan
 - .1 Perintis kemerdekaan
 - .2 Angkatan 45
 - .3 Veteran
- 222 Ormas Berdasarkan Kekaryaan
 - .1 PEPABRI
 - .2 Wreda Tama
- 223 Ormas Berdasarkan Kerohanian
 - .1 Nahdatul Ulama
 - .2 Muhammdiyah
 - .3 Persis
 - .4 PGI
 - .5 Dan Lain- lainnya
- 224 Lembaga Adat
- 225 Lembaga Swadaya Masyarakat
- 226 Ormas Berdasarkan Kedaerahan
 - .1 Paguyuban Pasundan

- .2 dan lain-lainya
- 227 Pembinaan dan Bantuan Keuangan Ormas
- 228 -
- 229 -
- 230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
- 231 Organisasi Kesehatan
 - .1 Ikatan Dokter Indonesia
 - .2 Ikatan Bidan Indonesia
 - .3 Organisasi Kesehatan lainnya
- 232 Organisasi Guru
 - .1 Persatuan Guru Republik Indonesia
 - .2 Organisasi Guru Swasta / Organisasi Guru lainnya
- 233 Organisasi Sarjana
 - .1 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
 - .2 Persatuan Insinyur Indonesia
 - .3 Persatuan Sarjana Muda Indonesia
 - .4 Masyarakat Ilmu Pemerintah Indonesia
- 234 Organisasi Advokat / Pengacara
- 235 Lembaga Bantuan Hukum
- 236 Korps Pegawai Republik Indonesia
- 237 Organisasi Wartawan Indonesia
 - .1 Persatuan Wartawan Indonesia
 - .2 Asosiasi Jurnalis Indonesia
 - .3 Organisasi Wartawan lainnya
- 238 Organisasi Profesi Fungsional
 - .1 Asosiasi Arsiparis Indonesia
 - .2 Ikatan Pustakawan Indonesia
- 239 Organisasi Profesi dan Fungsional lainnya
- 240 ORGANISASI PEMUDA
- 241 Komite Nasional Pemuda Indonesia
- 242 Organisasi Masyarakat
- 243 Organisasi Pelajar
- 244 Organisasi Pemuda Keagamaan
- 245 Organisasi Pemuda Kepartaian
- 246 Organisasi Pemuda lainnya
- 247 -
- 248 -
- 249 -
- 250 ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN
- 251 Organisasi Pekerja / Buruh
 - .1 Nasional
 - .2 Internasional
- 252 Organisasi Petani
- 253 Organisasi Nelayan
- 254 Organisasi Angkutan Darat
- 255 Organisasi Angkutan Laut
- 256 Organisasi Angkutan Darat
- 257 -
- 258 -

259	-
260	ORAGANISASI WANITA
261	Dharma Wanita Persatua
262	Kongres Wanita Indonesia
263	Ikatan Wanita Indonesia
264	Persit Kartika candra
265	Via Ardia Gharini
266	Jala Senasti
267	Bhayangkari
268	Organisasi Wanita lainnya
269	PKK
270	PEMILIHAN UMUM
271	Pencalonan
272	Nomor Urut Partai / Tanda Gambar
273	Kampanye
274	Petugas Pemilu
275	Pemilih / Daftar Pemilih
276	Sarana
	.1 TPS
	.2 Kendaraan
	.3 Surat suara
	.4 Kotak Suara
	.5 Dana
277	Pemungutan / Perhitungan Suara
278	Penetapan Hasil Pemilu
279	Penetapan Perolehan Jumlah kursi dan calon terpilih
280	KOMISI PEMILIHAN UMUM
281	Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
282	Komisi Pemilihan Umum Provinsi
283	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota
284	Panitia Pemilihan Kecamatan
285	Panitia Pemungutan Suara
286	Kelompok Penyelenggara Pungutan Suara
287	Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan
288	Sengketa Pemilu
289	-
290	BADAN PENGAWAS PEMILU
291	Badan Pengawas Pemilu Indonesia
292	Badan Pengawas Pemilu Provinsi
293	Badan Pengawas Pemilu Kabupaten / Kota
294	Badan Pengawas Pemilu Kecamatan
295	Pengawas pemilu lapangan
296	Pengawas Pemilu Luar Negeri
297	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
298	Dewan Kehormatan Provinsi
299	-

300

KEAMANAN / KETERTIBAN

- 300 KEAMANAN KETERTIBAN
- 301 Keamanan
- 302 Ketertiban
- 303 Penegakan Peraturan Perundang- undangan Daerah
 - .1 Pembinaan Pengawasan
 - .2 Penyidikan dan Penyidikan
- 304 Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - .1 Operasi dan Pengendalian
 - .2 Kerja sama
- 305 Sumber daya Aparatur Keamanan dan Ketertiban
 - .1 Pelatihan Dasar
 - .2 Pelatihan Teknis
- 306 Perlindungan Masyarakat
 - .1 Satuan Perlindungan Masyarakat
 - .2 Bina Potensi Masyarakat
- 307 -
- 308 -
- 309 -
- 310 PERTAHANAN
- 311 Darat
- 312 Laut
- 313 Udara
- 314 Intelejen
- 315 Sistem Pertahanan
- 316 -
- 317 -
- 318 -
- 319 -
- 320 KEMILITERAN
- 321 Latihan Militer
- 322 Wajib Militer
- 323 Operasi Militer
- 324 Kekayaan TNI, Pejabat Sipil dan TNI
- 325 Tentara nasional Indonesia
 - .1 Angkatan Darat
 - .2 Angkatan Laut
 - .3 Angkatan Udara
- 326 Alutsista
- 327 Bela Negara
- 328 Sarana dan Prasaran Militer
- 329 -
- 330 KEAMANAN
- 331 Kepolisian
 - .1 Polri
 - .2 Polisi Pamong Praja
 - .3 Polisi Hutan

- .4 Polisi Khusus
- .5 Polisi Wanita
- 332 Huru- Hara / Demonstrasi
- 333 Senjata Api / tajam
- 334 Bahan Peledak
- 335 Perjudian
- 336 Surat- surat kaleng
- 337 Penagduan
- 338 Himbauan / Larangan tentang keamanan dan ketertiban
- 339 Terosisme
- 340 PERTAHANAN SIPIL
 - .1 Kebijakan pemerintah mengenai pembentukan mawail dan matrik Hansip
 - .11 pengangkatan / pemberhentian Anggota Hansip
 - .12 Pengerahan dan pengendalian Hansip
 - .13 Kegiatan Pelaksanaan matrik Hansip dan Menwa
 - .14 pembinaan anggota hansip / Linmas
 - .15 Penghargaan anggota Hansip
 - .16 Hansip / Linmas Lanjut Usia
 - .17 Data Metrik Hansip dan Menwa
 - .18 Pendidikan / latihan hansip dan menwa
 - .19 Latihan Keterampilan Pamswakarsa
 - .2 Orientasi kesadaran bela negara bagi tokoh masyarakat
 - .21 Orientasi kesadaran bela negara bagi tokoh
 - .22 Pemberian tali asih bagi anggota
- 341 Perlindungan Sipil
- 342 Latihan Dasar
- 343 Suskalak A
- 344 Suskalak B
- 345 Suspim
- 347 -
- 348 -
- 349 -
- 350 KESEHATAN
- 351 Mekar / Pemberontak
- 352 Pembunuhan
- 353 Penganiayaan / Pencurian
 - .1 Bunuh Diri
 - .2 Keracunan
- 354 Subversi / penyelundupan / Narkotika
- 356 Pemalsuan
- 354 Korupsi / Penyelewengan / penyalahgunaan Jabatan / KKN
- 357 Pemerkosaan / Pelecehan seksual
- 358 Kenakalan
- 359 Kejahatan Lainnya
- 360 BENCANA
- 361 Gunung Berapi
- 362 Gempa
- 363 Angin Topan

364	Tanah Longsor
365	Kekeringan
366	Banjir
367	Kebakaran
368	Tsunami
369	Rob (Banjir Air Laut)
370	KECALAKAAN
371	Kecelakaan Darat
372	Kecelakaan Laut
373	Kecelakaan Udara
374	Sungai / Danau
375	Kecalakaa lainnya
376	-
377	-
378	-
379	-
380	PENANGGULANGAN BENCANA
381	-
382	-
384	-
385	-
386	-
387	-
388	-
389	-
390	SEARCH AND RESEARCH (SAR)
391	-
392	-
393	-
394	-
395	-
396	-
397	-
398	-
399	-

KESEJAHTERAAN RAKYAT

400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
401	Keluarga Pra Sejahtera
402	PNPM Mandiri Pedesaan
402	Jaminan Kesehatan Masyarakat
403	Subsidi
404	Program Raskin
405	Bantuan Langsung Tunai
406	Jaminan Sosial
407	Corporate Social Responsibility
408	-
409	-
410	PEMBANGUNAN DESA
411	Pembinaan Usaha Gotong royong
.1	Swadaya gotong royong
.11	Penataan gotong royong
.12	gotong royong dinamis
.13	gotong royong statis
.14	pungutan
.2	Lembaga Sosial Desa
.21	Pembinaan
.22	Klasifikasi
.23	Proyek
.24	Musyawara
.3	Latihan Kerja Masyarakat
.31	Kader Masyarakat
.32	Kuliah kerja nyata (KKN)
.33	Pusat Latihan
.34	Kursus- kursus
.35	Kurikulum / sylabus
.36	Ketrampilan
.37	Pramuka
.4	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (pkk)
.41	Program
.42	Pembinaan Organisasi
.43	Kegiatan
.5	Penyuluhan
.51	Publikasi
.22	Diskusi
.23	Pelaksanaan
.3	Masyarakat Pradesa
.31	Pembinaan
.32	Penyuluhan
.4	Pemugaran Peraturan dan Lingkungan Desa
.41	Rumah Sehat
.42	Proyek Perintis
.43	Pelaksanaan

- .44 Pengembangan
- .45 Perbaikan Kampung
- 414 Pengembangan Desa
 - .1 Tingkat Pengembangan Desa
 - .11 Jumlah Desa
 - .12 Pemekaran Desa
 - .13 Pembentukan Desa
 - .15 Evaluasi
 - .16 Bangan
 - .2 Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)
 - .21 Penyuluhan Program
 - .22 Lokasi UDKP
 - .23 Pelaksanaan
 - .24 Bimbingan / Pembinaan
 - .25 Evaluasi
 - .3 Tata Desa
 - .31 Inventarisasi
 - .32 penyusunan Pola Tata Desa
 - .33 Aplikasi Tata Desa
 - .34 Pemetaan
 - .35 Pedoman Pelaksanaan
 - .36 Evaluasi
 - .4 Perlombaan Desa
 - .41 Pedoman
 - .42 Penilaian
 - .43 Kejujuran
 - .44 Piagam
- 415 Koordinasi
 - .1 Sektor Khusus
 - .2 Rapat koordinasi Horizontal (RKH)
 - .3 Timn Koordinasi Pusat (TKP)
 - .4 Kerjasama
 - .41 Luar Negeri (UNICEF)
 - .42 Perguruan Tinggi
 - .43 Kementrian / Lembaga Non Kementrian
- 415 -
- 417 -
- 418 -
- 419 -
- 420 PENDIDIKAN
 - .1 Pendidikan khusus klasifikasi disini pendidikan
- 421 Sekolah
 - .1 Pra sekolah Pendidikan usian Dini
 - .2 Sekolah Dasar
 - .3 sekolah Menengah
 - .4 Sekolah Tinggi
 - .5 Sekolah Kejuruan
 - .6 Kegiatan Sekolah
 - .7 Kegiatan Pelajar dan mahasiswa

- .71 Reuni, Dharmawisata
- .72 Pelajar / Mahasiswa teladan
- .73 Resimen Mahasiswa
- .8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
- .81 Resimen Mahasiswa
- .9 Sekolah Pendidikan Luar sekolah / Pemberantasan
- 422 Administrasi Sekolah
 - .1 Persyaratan Masuk sekolah, testing, pendaftaran, ospek
 - .2 Tahun Ajaran
 - .3 Hari Libur
 - .4 Uang Sekolah / SPP
 - .5 Beasiswa
 - .6 Kurikulum
- 423 Metode Belajar
 - .1 kuliah
 - .2 Ceramah, Simposium / Seminar
 - .3 Diskusi
 - .4 Kuliah Lapangan, Kuliah Kerja Nyata
 - .5 Kurikulum
 - .6 Karya Tulis / Skripsi / Tesis / Desertasi
 - .7 Ujian
- 424 Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Pelatih
- 425 Sarana Pendidikan
 - .1 Gedung
 - .11 gedung Sekolah
 - .12 Kampus
 - .13 Pusat Kegiatan Mahasiswa
 - .14 Perputakaan
 - .15 Laboratorium
 - .2 Buku Pelajaran
 - .3 Perlengkapan Sekolah
- 426 Keolahragaan

Klasifikasi disini : PON, Porsade, Olimpiade dan sebagainya

 - .1 Cabang Olah Raga Termasuk Atlet
 - .2 Sarana Olah Raga
 - .21 Gedung Olahraga
 - .22 Stadion
 - .23 Lapangan
 - .24 Kolam Renang
 - .3 Pesta Olah raga
 - .4 KONI
- 427 Kepemudaan

Meliputi : Organisasi, Sarana dan kegiatan remaja

Klasifikasi disini : Gelanggang remaja/Gelanggang generasi muda
- 428 Kepramukaan
- 429 Pendidikan Kedinasan
- 430 KEBUDAYAAN
- 431 Kesenian

- .1 Cabang Kesenian
- .2 Sarana Kesenian
- .3 Prasarana
 - .31 Gedung
 - .32 Padepokan
- .4 Usaha Pertunjukan
- 432 Kepurbakalaan
 - .1 museum
 - .2 Peninggalan Kuno
 - .21 Candi, Peninggalan Kuno termasuk pemugaran
 - .22 Benda
- 433 Sejarah dan Nilai Tradisional
- 434 Bahasa
 - .1 Bahasa Indonesia
 - .2 Bahasa Daerah
 - .3 Bahasa Asing
- 435 Usaha Pertunjukan, hiburan, kesenangan
 - .1 Upacara Adat
 - .2 Pakaian Adat
 - .3 Rumah Adat
- 436 Kepercayaan
- 437 Adat tradisional, pelestarian dan Revitalisasi Kebudayaan
- 438 Perlindungan kebudayaan
- 439 Kearifan Lokal Kesenian
- 440 KESEHATAN
- 441 Pembinaan Kesehatan
 - .1 Gisi
 - .2 Mata
 - .3 Jiwa
 - .4 Penyakit Dalam, Kanker
 - .5 UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
 - .6 Perawatan
 - .7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
 - .8 PIN (Pekan Imunisasi Nasional)
- 442 Obat- obatan
 - .1 Pengadaan
 - .2 Penyimpanan
- 443 Penyakit Menular, Pemberantasan Penyakit
 - .1 Pencegahan
 - .2 Pemberantasan dan pencegahan penyakit menular langsung (P2ML)
 - .21 Kusta
 - .22 Kelamin
 - .23 Frambosia
 - .24 TBC
 - .25 HIV, AIDS
 - .3 Epidermiology dan karantina (Epidika)
 - .31 Kolera
 - .32 Imunisasi

.33	Surveilense
.4	Pemberantasan dan pencegahan penyakit menular sumber bintang (P2B)
.41	Malaria
.42	Dengue (Deman Berdarah)
.43	Filaria
.44	Serangga
.45	Rabies
.46	Antraks
.47	Flu Burung
.5	Sanitasi
.51	Tempat Pembuatan dan penjualan Makanan dan Minuman.
.52	Sarana Air Minum dan jamban keluarga (samijaga)
.53	Pestisida
.54	Pencemaran Lingkungan
.6	Hygiene
.61	A. Paktoris
.62	IMA
.63	Hipertensi
.64	Stroke
.65	Diabetes melitus (DM)
.66	CA. Service
.67	CA. Mammae
.68	CA. Hepak
.69	CA. Paru
.7	Dekopensatiokordis
.71	PPOM
.72	Asma
.73	Kecelakaan Lalu Lintas
.74	Psikosis
444	Gizi
.1	Kekurangan makanan, kelaparan, busung lapar
.2	Keracunan Makanan
.3	Menu Makanan
.4	Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD)
.5	Program makanan tambahan amal sekolah (PMTAS)
445	Rumah Sakit / Poliklinik
.1	RSUP
.2	Rumah sakit jiwa
.3	Rumah Sakit Mata
.4	Puskesmas
.5	Balai Kesehtan (Poliklinik)
.6	Balai Kesehatan ibu dan anak
.7	Rumah sakit bersalin
.8	Posyandu
.9	Rumah Sakit Paru
446	Tenaga Medis / Paramedis
447	Alat Medis

- .1 Pengadaan alat kesehatan
- .2 Penyimpanan alat kesehatan
- .3 Standarisasi alat kesehatan
- .4 Penghapusan Alat Kesehatan
- 448 Pengobatan Tradisional
 - .1 Pijit
 - .2 Tusuk Jarum
 - .3 Jamu Tradisional
 - .4 Dukun
- 449 Apotik / Toko Obat
 - .1 Surat izin
 - .2 Surat Izin Kerja
- 450 AGAMA
- 451 Islam
 - .1 Peribadaan
 - .11 Sholat
 - .12 Zakat
 - .13 Puasa
 - .14 MTQ
 - .15 Haji
 - .16 Umroh
 - .2 Rumah ibadah / Masjid / Mushola
 - .3 Tokoh Agama
 - .4 Pendidikan Agama Islam
 - .41 Tinggi
 - .42 Menengah
 - .43 Dasar
 - .44 Pondok Pesantren
 - .45 Gedung Sekolah
 - .46 Tenaga Pengajar
 - .47 Buku Agama
 - .48 Dakwah
 - .49 Organisasi / Lembaga Pendidikan
 - .5 Harta Agama (Wakaf, baitul Maal dsb)
 - .6 Peradilan agama
 - .7 Organisasi Keagamaan bukan politik majelis ulama
 - .8 Mazhab
- 452 Protestan
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibada / Gereja
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Domine
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Gereja
- 453 Katolik
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibada / Gereja
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Pastor
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Gerejani

- 454 Hindu
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama, Rokhaniawan
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Agama Hindu
- 455 Budha
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah ibadah
 - .3 Tokoh Agama, Rokhaniawan
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Keagamaan
- 456 Konghucu
- 457 -
- 458 -
- 459 -
- 460 SOSIAL
- 461 Rehabilitasi Penderita Cacat
 - .1 Cacat Mata
 - .2 Cacat Tubuh
 - .3 Cacat Mental
 - .4 Bisu / Tuli
- 462 Tuna Sosial
 - .1 Gelandangan
 - .2 Pengemis
 - .3 Tuna Susila
 - .4 Anak Nakal dan Narkoba
- 463 Kesejahteraan Anak / Keluarga
 - .1 Anak Putus Sekolah
 - .2 Ibu Teladan
 - .3 Anak Asuh
- 464 Pembinaan Pahlawan
 - Meliputi : penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada Pahlawan dan Jandanya.
 - .1 Pahlawan
 - .2 Perintis Kemerdekaan
 - Meliputi : penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada Pahlawan dan jandanya.
 - .3 Cacat Veteran
- 465 Kesejahteraan Sosial
 - .1 Lanjut Usia
 - .2 Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi, korban tindak kekerasan
- 466 Sumbangan Sosial
 - Meliputi : penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazaar, dsb
 - .1 Korban Bencana
 - .2 Pencarian Dana untuk sumbangan
 - .3 Panti Asuhan
 - .4 Yayasan / Panti Lainnya

- 467 Bimbingan Sosial
 - Meliputi : Bimbingan Pendidikan, kesehatan, pemukiman dsb
 - .1 Masyarakat Suku Asing
- 468 PMI
- 469 Makam
 - .1 Umum
 - .2 Pahlawan
 - .3 Khusus Keluarga, Raja
 - .4 Krematorium
- 470 KEPENDUDUKAN
- 471 Pendaftaran Penduduk
 - .1 Identitas Penduduk
 - .11 Biodata
 - .12 Nomor Induk Kependudukan
 - .13 Kartu Tanda Penduduk
 - .14 Kartu Keluarga
 - .15 Advokasi Identitas Penduduk
 - .2 Perpindahan Penduduk dalam wilayah indonesia
 - .21 Perpindahan Penduduk WNI
 - .22 Perpindahan Penduduk WNA dalam wilayah indonesia
 - .23 Perpindahan Pendudukl WNA dan WNI Tinggal sementara
 - .24 Daerah terbelakang / tertinggal
 - .24 Bedol Desa
 - .3 Perpindahan Penduduk Antar Negara
 - .31 Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri
 - .32 Orang Asing Tinggal Sementara
 - .33 Orang asing Tinggal Tetap
 - .34 Perpindahan Penduduk antar Negara di wilayah perbatasan antar negara (Perlintasan batas tradisional)
 - .4 Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan
 - .41 Akibat bencana alam
 - .42 Akibat kerusuhan sosial
 - .43 Pendaftaran penduduk daerah terbelakang
 - .44 Pendaftaran penduduk rentan
- 472 Pencatatan Sipil
 - .1 Kelahiran, kematian, dan advokasi
 - .11 Kelahiran
 - .12 Kematian
 - .13 Advokasi kelahiran dan kematian
 - .2 Perkawinan, Perceraian, dan Advokasi
 - .21 Perkawinan Agama Islam
 - .22 Perkawainan agama Non Islam
 - .23 Perceraian Agama Islam
 - .24 Perceraian Agama Non Islam
 - .3 Pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak serta Perubahan dan pembatalan akta dan advokasi pengangkatan anak

- .31 Pengangkatan anak
- .32 Pengakuan anak
- .33 Pengesahan anak
- .34 Perubahan anak
- .35 Pembatalan anak
- .36 Advokasi pengurusan pengangkatan, pengakuan, dan Pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta
- .4 Pencatatan Kewarganegaraan Anak
 - .41 Akibat perkawinan
 - .42 Akibat Kelahiran
 - .43 Non Perkawinan
 - .44 Non Kelahiran
 - .45 Perubahan WNI ke WNA
- 473 Informasih Kependudukan
 - .1 Teknologi Informasi
 - .11 Perangkat Kertas
 - .12 Perangkat Lunak
 - .13 Jaringan Komunikasi Data
 - .2 Kelembagaan Dan Sumber Daya Informasi
 - .21 Daerah Maju
 - .22 Daerah Berkembang
 - .23 Daerah Terbelakang
 - .3 Pengelolaan Data Kependudukan
 - .31 Pendaftaran Penduduk
 - .32 Kejadian Vital
 - .33 Kependudukan Non registrasi
 - .4 Pelayanan Informasi kependudukan
 - .41 Media Elektronik
 - .42 Media Cetak
 - .43 Outlet
- 474 Perkembangan Penduduk
 - .1 Pengarahan Kuantitas Penduduk
 - .11 Struktur Jumlah
 - .12 Komposisi
 - .13 Fertilitas
 - .14 Kesehatan Produksi
 - .15 Mortilitas Penduduk
 - .16 Mortilitas Penduduk
 - .2 Pengembangan Kualitas Penduduk
 - .21 Anak dan Remaja
 - .22 Penduduk Usia Produktif
 - .23 Penduduk Lanjut Usia
 - .24 Gender
 - .3 Penataan Persebaran Penduduk
 - .31 Migrasi Antar Wilayah
 - .32 Migrasi Internasional
 - .33 Urbanisasi
 - .34 Sementara

- .35 Migrasi Non Permanen
- .4 Perlindungan Pemberdayaan Penduduk
- .41 Pengembang Sistem Perlindungan Penduduk
- .42 Pelayanan kelembagaan Ekonomi
- .43 Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya
- .44 Partisipasi Masyarakat
- .5 Pengembangan Wawasan Kependudukan
- .51 Pendidikan Jalur Sekolah
- .52 Pendidikan Jalur Luar Sekolah
- .53 Pendidikan Jalur Masyarakat
- .54 Pembangunan Berwawasan Kependudukan
- 475 Proyek dan Penyerasian Kebijakan Pendudukan
 - .1 Indikator Kependudukan
 - .11 Perumusan Penetapan dan Pengembangan Indikator Kependudukan
 - .12 Pemanfaatan Indikator Kependudukan
 - .13 Sosialisasi Indikator Kependudukan
 - .2 proyeksi Kependudukan
 - .21 Penyusunan dan pengembangan proyeksi kependudukan
 - .22 Pemanfaatan proyeksi kependudukan
 - .3 Analisis dampak kependudukan
 - .31 Penyusunan dan Pengembangan
 - .32 Pemanfaatan analisis dampak kependudukan
 - .4 Penyerasian kebijakan lembaga non pemerintah
 - .41 Lembaga Internasional
 - .42 Lembaga Masyarakat dan nirlaba
 - .43 Lembaga Usaha Swasta
 - .5 Penyerasian kebijakan lembaga pemerintah
 - .51 Lembaga Pemerintah
 - .52 Pemerintah Provinsi
 - .53 Pemerintah kabupaten / Kota
 - .6 Analisis
- 476 Monitoring
- 477 Evaluasi
- 478 Dokumentasi
- 479 -
- 480 Media Massa
- 481 Penerbitan
 - .1 Surat Kabar
 - .2 Majalah
 - .3 Buku
 - .4 Penerjemahan
 - .5 Press
 - .6 Kliping Koran
- 482 Radio
 - .1 RRI
 - .2 Non RRI
 - .3 Luar Negeri

	.4	Swasta
	.5	Komunitas
483		Televisi
	.1	TVRI
	.2	Televisi Swasta
	.3	Televisi Asing
	.4	Televisi Lokal
484		Film
485		Pers
	.1	Kewartawanan
	.2	wawancara
	.3	Informasi Nasional
486		Grafika
487		Penerangan
	.1	Pameran Non Komersil
488		Press / Operation Room
489		Hubungan Masyarakat
490		Pengaduan Masyarakat
491		Surat Pembaca
492		
493		
494		
495		
496		
497		
498		
499		

500

PEREKONOMIAN

- 500 PEREKONOMIAN
 - .1 Dewan Stabilasi
 - .2 Komisi Ekonomi
- 501 Pengadaan Pangan
- 502 Pengadaan Sandang

- 503 Perijinan pada umumnya, untuk perijinan suatu bidang
Klasifikasikan pada Masalahnya
- 504 Ekonomi Makro
- 505 Ekonomi Mikro
- 506 Ekonomi Kerakyatan
- 507 -
- 508 -
- 509 -
- 510 PERDAGANGAN
Klasifikasikan disini ; Tataniaga
 - .1 Promosi Perdagangan
 - .11 Pekan Raya
 - .12 Iklan Produk
 - .13 Pameran Non Komersil
 - .14 Perlombaan (lomba Desai, Busana, Kerajinan)
 - .15 Pasar
 - .16 Pertokoan, Kios, PKL
 - .2 Pelelangan, Distribusi
 - .21 Pemasaran Sembako
 - .22 Pemasaran Hasil Industri
 - .23 Penentuan Harga Pokok
 - .3 Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
 - .31 Rencana dan Program Kerja
 - .32 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
 - .33 Pelaksanaan Teknis
 - .34 Pemantauan
 - .35 Evaluasi dan Pelaporan
 - .4 Perijinan
 - .41 Penerbitan SIUP
 - .42 Perpanganan
 - .43 Ijin Prinsip
 - .44 Rekomendasi
 - .5 Perdangan Anatar Pulau
 - .51 Kerjasama Bahan Baku
 - .52 Industri Pemasaran
 - .53 Kontrak
 - .6 Tera
 - .61 Tera Ulang Ukuran
 - .62 Takaran
 - .63 Timbangan

- .64 Kalibrasi
- .65 Cap Tanda Tera
- .66 Biayah Tera
- .7 Bantuan Peralatan
- .71 Proposal
- .72 Surat Perjanjian / Kontrak
- .73 Serah Terima
- .8 Perijinan / Rekomendasi tanda pabrik
- .9 Kemetrologian
- .91 Standar Tingkat Tiga
- .92 Standar Kerja Satuan Ukuran
- .93 Standar Metrologi
- .931 Peralatan
- .932 Laboratorium Metrologi
- .933 Tenki Ukuran Mobil
- .934 Meter Tanki
- .935 Kwh Meter
- .936 SPBU
- 511 Pemasaran
 - .1 Sembilan bahan pokok, tambahkan kode wilayah, beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun dsb
 - .2 Pasar
 - .3 Pertokoan, kaki Lima, Kios
- 512 Ekspor
 - .1 Ekspor Hasil Industri
 - .2 Ijin Ekspor
 - .3 Pengembangan Pasar Luar Negeri
 - .4 Menejemen Perdagangan Internasional
 - .41 Kebijakan
 - .42 Pemasaran
 - .5 Pemberitahuan Ekspor Barang
 - .6 Pengawasan Mutu Barang
 - .7 Eksporing Terdaftar
 - .8 Evaluasi dan Pelaporan
- 513 Impor
 - .1 Ijin Impor
 - .11 Pemberian Ijin
 - .12 Pengendalian Ijin
 - .2 Standar Mutu dagang Impor
 - .3 menejemen Perdagangan Internasional
 - .4 Kegiatan Impor
 - .41 Pembinaan Impor
 - .42 Pengendalian Impor
 - .43 Pemantauan Impor
 - .5 Faktor- faktor Pendukung
 - .6 Pengawasan Mutu Barang Impor
 - .7 Penyaluran Kegiatan Impor
 - .71 Bahan Komsumsi
 - .72 Bahan Baku

- .73 Bahan Ponolong
- .8 Evaluasi dan pelaporan kegiatan impor
- 514 Perdagangan Antar Pulau
 - .1 Peti kemas
 - .2 Kerjasama bahan baku
 - .3 Industri Kemasaran
 - .4 Kontrak
- 515 Perdagangan Luar Negeri
 - .1 Pengembangan potensi Luar Negeri
 - .11 Promosi dan Informasi
 - .12 Pameran
 - .13 Kerjasama
- 516 Pergudangan
 - .1 Peti Kemas
 - .2 Tengki Penyimpanan
- 517 Aneka Usaha Perdagangan
- 518 Koperasi (untuk BUUD, KUD Lihat Klasf . 147. 231- 147. 232)
- 519 Metrologi
- 520 PERTANIAN
- 521 Tanaman Pangan
 - .1 Program
 - .11 Bimas / inmas termasuk kredit
 - .12 Penyuluhan
 - .2 Produksi
 - .21 Padi / panen
 - .22 Palawija
 - .23 Jagung
 - .24 Keteloh Pohon
 - .25 Holtikulura
 - .26 Sayur / Buah –buahan
 - .27 Tanaman Hias
 - .3 Sarana Usaha Pertanian
 - .31 Peralatan, meliputi Traktor dan peralatan lainnya
 - .32 bantuan Peralatan
 - .33 Pembibitan
 - .34 Pupuk
 - .4 PerlindunganTanaman
 - .41 Penyakit Daun, Batang
 - .42 Pemberantasan hama, Meliputi : Penyemprotan, Penyiangan
 - .43 Gropyokan, sparayer, pemberantasan memalalui udara
 - .44 Pestisida
 - .5 Tanah Pertanian pangan
 - .51 Persawahan
 - .52 Perladangan
 - .53 Kebun
 - .54 KTA / lahan kritis
 - .6 Usaha petani
 - .7 Bina Usaha

- .8 Pasca Panen
- 522 Kehutanan
 - .1 Program
 - .11 Hak Pengusaha Hutan
 - .12 Tata Guna Hutan
 - .14 Perpetaa Hutan
 - .2 Produksi
 - .21 Kayu
 - .22 Non Kayu
 - .3 Sarana Usaha Kehutanan
 - .4 Penghijauan, Reboisasi
 - .5 Kelestarian
 - .51 Cagar Alam,Maraga Satwa,Suaka Marga satwa
 - .52 Berburu, meliputi : larangan dan ijin berburu
 - .53 Kebun Binatang
 - .54 Konservasi lahan
 - .55 Kawasan Lindungan
 - .6 Penyakiit / hama
 - .7 Jenis- jenis Hutan
 - .71 Hutan Hidup
 - .72 Hutan Wisata
 - .73 Hutan Produksi
 - .74 Hutan Lindung
 - .75 Hutan Rakyat
- 523 Peikanan dan Kelautan
 - .1 Program
 - .11 Penyuluhan
 - .12 Teknologi
 - .2 Produksi
 - .21 Pelelangan
 - .3 Usaha Perikanan
 - .31 Pembibitan
 - .32 Daerah Penangkapan
 - .33 Pertambakan Meliputi : Tambak Ikan, Tambak Udang, dan lain-lain
 - .34 Jarring terapung
 - .4 Sarana
 - .41 Peralatan
 - .42 Kapal
 - .43 Pelabuhan
 - .5 Pengusaha
 - .6 Nelayan
 - .7 Data Perikanan
 - .8 Nelayan
 - .81 Perkampungan Nelayan
 - .82 Pelanggaran kapal
 - .9 Pelestarian Ikan
- 524 Peternakan
 - .1 Produksi

	.11	Susu Ternak Rakyat
	.12	Telur
	.13	Daging
	.14	Kulit
	.2	Sarana Usaha Ternak
	.21	Pembibitan
	.22	Kandang Ternak
	.3	kesehatan Hewan
	.31	Penyakit Hewan
	.32	Pos Kesehatan Hewan
	.33	Tesi pollorum
	.34	Karantina
	.35	Pemberantasan penyakit hewan termasuk usaha pencegahanya
	.4	Perunggasan
	.41	Ayam Ras
	.42	Ayam Buras
	.43	Itik
	.44	Burung
	.5	Pekembangan ternak
	.51	Insemibasi Buatan
	.52	Pembibitan/ Bibit Unggul
	.53	Penyebaran Ternak
	.6	makanan Ternak
	.7	Tempat pemotongan Hewan
	.8	Data Peternakan
525		Perkebunan
	.1	Program
	.2	Produksi
	.21	Karet
	.22	Teh
	.23	Tembakau
	.24	Tebu
	.25	Cengkeh
	.26	Kopra
	.27	Kopi
	.28	Coklat
	.29	Aneka tanaman
	.3	Pembibitan
	.31	Gulma
	.4	Hama / Penyakit
	.41	Badra
	.5	Pengelolaan lahan
	.51	Terasering
526		Ketahanan Pangan
	.1	Program Bimbingan Masal
	.2	Pengembangan sarana Sumber Daya
	.21	Pembinaan Teknologi
	.22	Sarana Produksi dan Permodalan

	.23	Kelembagaan
	.3	Agribisnis
	.31	Mutu Hasil
	.32	Pengolahan Hasil pangan
	.33	Kemitraan
	.4	Distribusi Pangan
	.41	Sistem dan Pola Distribusi
	.42	Sarana dan Prasarana Distribusi
	.43	Pengadaan dan Cadangan Pangan
	.5	Kewaspadaan dan Keanekaragaman
	.51	Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan
	.52	Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
	.53	Sistem Informasi Pangan
527		Perkembangan Ketahanan Pangan
	.1	Kelembagaan dan Infrastruktur pangan
	.2	Distribusi harga pangan
	.3	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
	.4	Konsumsi dan keamanan pangan
528	-	
529	-	
530		PERINDUSTRIAN
531		Industri Logam
532		Industri Mesin
533		Industri Kimia / Farmasi
534		Industri Tekstil
535		Industri makanan dan Minuman
536		Aneka Industri / Perusahaan
	.1	Home Industri
537		Aneka Kerajinan
	.1	Kerajinan Rakyat
538		Usaha Negara / BUMN
	.1	Perjan
	.2	Perum
	.3	Persero / CV / PT
539		Perusahaan Daerah / BUMD / BULD
540		PERTAMBANGAN / KESAMUDERAAN
541		Minyak Bumi
	.1	Pengusahaan / Eksplorasi
542		Gas Bumi
	.1	Eksplorasi / Pengeboran
	.11	Kontarak Kerja
	.2	Pengelolaan , meliputi : tengki, pompa, tanker, terakhit, tanah liat Pasir
543		Aneka Tambang
	.1	Timah
	.2	Alumunium , boxit
	.3	Besi
	.4	Tembaga

- .5 Batubara
- 544 Logam Mulia : Emas, Intan, Perak
- 545 Logam
- 546 Geologi
 - .1 Vulkanologi
 - .11 Pengawasan Gunung Merapi
 - .2 Sumur artetis
- 547 Hidrologi
- 548 Kesamuderaan
- 549 Pesisir pantai/ Kelautan
- 550 PERHUBUNGAN
- 551 Perhubungsn Darat
 - .1 Lalu Lintas jalan raya, sungai, danau
 - .11 Keamanan lalu lintas, rambu- rambu
 - .12 Ujian Kelayakan kendaraan bermotor (Kir)
 - .2 Angkutan jalan raya
 - .21 Perijinan
 - .22 Terminal
 - .23 Alat Angkut
 - .24 Jembatan timbang / lebih muatan
 - .3 Angkutan Sungai
 - .31 Perijinan
 - .32 Terminal
 - .33 Pelabuhan
 - .34 Keselamatan, rambu- rambu
 - .35 Lalu lintas
 - .36 Alur dan Kolam Pelabuhan
 - .37 Trayek
 - .38 Sarana / kapal
 - .39 Kecelakaan
 - .4 Angkutan Danau
 - .41 Perijinan
 - .42 Terninal
 - .43 Pelabuhan
 - .44 Keselamatan, rambu- rambu
 - .45 Lalulintas
 - .46 Alur dan Kolam Pelabuhan
 - .47 Trayek
 - .48 Sarana / kapal
 - .49 Kecelakaan
 - .5 Feri
 - .51 Perijinan
 - .52 Terminal
 - .53 Pelabuhan
 - .54 sarana dan prasarana kapal
 - .57 Treyek
 - .58 Sarana / Kapal
 - .59 Kecelakaan
 - .6 Perkeretaapian

- .61 Sarana (lokomotif, Gerbong, Bogie)
- .62 Signal
- .63 Treyek
- .64 Angkutan Penumpang
- .65 Angkutan Barang
- .66 Keselamatan
- .67 Kecelakaan
- .68 Perawatan / Perbaikan
- .69 Perijinan
- 552 Perhubungan Laut
 - .1 Lalu Lintas Angkutan laut
 - .11 Keamanan Lalu Lintas, rambu- rambu, mercusuar
 - .12 Pelayaran Luar Negeri
 - .13 Pelayaran Dalam Negeri
 - .2 Perkapalan alat angkutan
 - .21 Kapal Penumpang
 - .22 Kapal Barang
 - .23 Kapal Perang / Patroli
 - .24 Kapal Tanker
 - .25 Ponton/Tonkang
 - .26 Kapal Layar
 - .27 Kapal Layar Motor
 - .28 Kapal Kontainer
 - .3 Pelabuhan
 - .31 Tanah/Lokasi
 - .32 Alur Layar
 - .33 Dermaga
 - .34 Terminal Penumpang
 - .35 Terminal Kontainer
 - .36 Bangunan / Gedung / Gedung
 - .37 Perlengkapan tambat labuh
 - .38 Lapangan
 - .39 Pelabuhan Khusus / Dermaga Khusus
 - .4 Pengerukan
 - .41 Alur Pelayaran
 - .42 Kolam Pelabuhan
 - .43 Reklamasi Pantai
 - .45 Pekerjaan Bawah Air (Soluage)
 - .5 Penjagaan Pantai
 - .51 Patroli Bandar
- 553 Perhubungan Udara
 - .1 Angkutan Udara / Keamanan lalulintas udara
 - .2 Pelabuhan Udara
 - .3 Alat Angkutan
- 554 Pos
- 555 Telekomunikasi
 - .1 Telepon
 - .2 Telegram
 - .3 Telex / SSB

- .4 Faximile
- .5 Satelit
- .6 Stasiun Bumi, Parabola
- .7 Wartel
- 556 Pariwisata dan Rekreasi
 - .1 Izin Usaha Kepariwisataaan
 - .11 Izin Usaha Sarana Wisata
 - .12 Izin Usaha Objek dan Atraksi Wisata
 - .2 Wisatawan
 - .21 Wisatawan Mancanegara
 - .22 Wisatawan Nusantara
 - .3 Obyek Wisata dan Atraksi
 - .31 Obyek Wisata
- Meliputi : Wisata Tirta, Situ, dan Marina Alam, Wisata Remaja dan Sosial, Wisata Konvensi, Budaya dan Religius.
 - .32 Atraksi
 - .321 Hiburan Umum
 - .4 Promosi Kepariwisataaan
 - .41 Sadar Wisata
 - .42 Mandala Wisata
 - .43 Tourism Information Centre
 - .44 Pameran Pariwisata meliputi ; Pekan Pariwisata dan Pata
 - .45 Taman Mini Indonesia Indah
 - .46 Bimas Pariwisata
 - .5 Perjalanan Wisata
 - .51 Biro Perjalanan
 - .52 Angkutan Umum
 - .6 Pramuwisata
 - Meliputi : Pramuwisata Madya, Pramuwisata Muda, Pramuwisata Khusus
 - .7 Fasilitas Hotel
 - .71 Hotel / Motel
 - .72 Losmen / Penginapan
 - .73 Penginapan Remaja
 - .74 Pondok Wisata
 - .75 Perkemahan
 - .76 Restoran, Bar dan Diskotik
 - .77 Rumah Makan
- 557 Meteorologi
 - .1 Ramalan Cuaca
 - .11 Curah Hujan
 - .12 Kemarau
- 558 -
- 559 -
- 560 TENAGA KERJA
 - .1 Pengangguran
 - .2 Job Order TKI Ke Luar Negeri oleh PJTKI
 - .3 Rekrutmen Calon TKI / TKW

- .4 Seleksi Tenaga Kerja Luar Negeri
- .41 Pendaftaran dan seleksi calon TKI / TKW
- .42 Berkas Persyaratan dan hasil Cek kesehatan
- .43 Perlindungan tenaga kerja pelayanan
- .44 Perlindungan TKI /TKW
- .5 Persyaratan TKI / TKW
- .51 Permohonan Rekomendasi Pasport
- .52 Perjanjian Kerja TKI / TKW Kartu
- .53 Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
- .54 Permohonan Fisikal Ke Luar Negeri
- .55 Pelatihan TKI / TKW
- .56 Perjanjian Kerja TKI dengan pengguna
- .57 Kurikulum Pelatihan TKLN
- .58 Kualifikasi dan kompetensi Instruktur TKLN
- .59 Ujian Kompetensi CTKI oleh LSP dan BNSP
- .6 Pemberangkatan Tenaga Kerja
- .61 Pemberangkatan Ke luar Negeri
- .62 Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI / TKW ke Luar Negeri
- .63 Berita Acara Serah Terima TKI / TKW
- .7 Pemulangan Tenaga Kerja
- .71 Kumpulan TKI / TKW Karena Kontraknya Habis
- .72 PemulanganTKI / TKW Ilegal
- .73 TKI / TKW
- .74 Pelayanan CTKI (calon tenaga kerja Indonesia)
- .75 Data dan Informasi Penempatan TKI
- .76 Monitoring TKI
- .77 TKI Bermasalah
- .78 Bimbingan Pasca TKI
- 561 Upah
 - .1 Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah / Nasional
 - .2 Permohonan penangguhan pelaksanaan pembayaran upah Minumum kabupaten / kota dan Provinsi
 - .3 Kebutuhan Fisik Minimum
 - .4 Penghitungan upah kerja (termasuk di dalamnya upah lembur)
 - .5 Laporan dan Remittance
 - .6 Pembayaran Gaji / Upah TKI / TKW
 - .7 Upah Minimum kabupaten / Kota
- 562 Penempatan Tenaga Kerja
 - .1 Penempatan tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja Mandiri (TKMT)
 - .11 Penempatan Tenaga Kerja Mandiri Profesional (TKMP)
 - .12 Penempatan Tenaga Kerja Non terdidik dan non profesional, Pengembangan kesempatan berusaha/ peluasan kerja
 - .2 Kewsempatan Kerja Bersama (KKB)
 - .3 Lembaga Penyalur Tenaga Kerja

- .31 Ijin Pendirian Lembaga Penyalur Jasa Tenaga Kerja
Kerja Lokal / Daerah Antar Kerja Negara
- .32 Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja
(PJTKI / BKS / BKK)
- .33 Pencabutan Ijin penyalur jasa tenaga kerja
(PJTKI / BKS / BKK
- .4 Informasi Pasar Kerja
- .41 Bursa Pasar Kerja
- .5 Ijin Tenaga kerja warga negara asing pendatang
- .51 Antar Kerja Lokal
- .52 Antar Kerja Antar Daerah
- .53 Antar Kerja Antar Negara
- 54 Tenaga Kerja Antar Kerja Khusus (Wanita, Pemuda,
Lansia dan Penyandang Cacat)
- 563 Latihan Kerja
 - .1 Pendidkan Kerja
 - .11 Pendidikan dan Latihan Kerja
 - .12 Diklat di dalam Negeri (PKL, Prakerim, OJT)
 - .13 Diklat Di luar Negeri (Pemagangan)
 - .2 Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
 - .21 Tempat Pelatihan (BLK)
 - .2 Instruktur / Pelatih
 - .23 Modul / silabus dan bahan praktek
 - .24 Kurikulum
 - .25 Sertifikat
 - .3 Kerjasama Pelatihan Kerja
 - .4 Produktifitas Tenaga Kerja
 - .5 Pemagangan Tenaga Kerja
 - .51 Diklat Pemagangan
 - 6 Standarisasi Sertifikasi dan kompetensi
- 564 Tenaga Kerja Sukarela
 - .1 Butsi
 - .2 Padat kerja
- 565 Perselisihan Perburuhan
 - .1 Perselisihan dan Perkara Perbjuruhan
 - .11 Pengaduan Perkara Perburuhan
 - .12 Pemeriksaan Perkara
 - .13 Penyelidikan
 - .14 Sidang Perkara Perselisihan Buruh
 - .15 Hasil Putusan Sidang Perkara Persilisihan Buruh
 - .16 Peninjauan kembali hasil putusan sidang KP2K
 - .17 Permintaan Eksekusi terhadap hasil putusan KP2K
 - .18 Daftar Usulan, susulan dan Penetapan Anggota KP2K
 - .2 Pemogokan / Unjuk Rasa Tenaga Kerja
- 566 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (b K3)
 - .1 Perselisihan dan perkara Hukum tenaga kerja
 - .2 Pemakaian alat kesehatan kerja
 - .3 keterangan kelayakan atau pelindung diri (APD) dalam kerja

- .4 Pengangkatan dan pembinaan Ahli keselamatan dan kesehatan Kerja (K3)
- .5 Pelatihan / Pembinaan Hyperkes dan keselamatan kerja
- .6 Pengujian dan hasil pemeriksaan Hyperkes
- .7 Gangguan lingkungan Tempat Usaha (Misal : suara, bising, Limba dan lain-lain)
- .8 Perlengkapan Sarana Kerja
- .81 Pemasangan dan pemakaian lift (pesawat Angkat/angkut)
- .82 Pemasangan dan Pemakaian pesawat uap (katel uap)
- .83 Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel
- .84 Pemasangan dan Pemakaian tanki tak Bertekanan
- .85 Pemasangan dan pemakaian alat pemadam Kebakahrn
- .9 Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk Malam Hari (Sift Malam)
- 567 Pemutusan Hubungan Kerja
 - .1 Pengaduan PHK sepihak
 - .2 PHK Masal
 - .3 Bantuan Hukum Bagi Perkerja yang Di PHK
 - .4 Ijin Mealkukan PHK
 - .5 Perhitungan Masa Kerja bagi Pekerja yang di PHk
 - .6 Pemberian uang tunggu bagi pekerja yang di PHK
 - .7 Pembeian uang pasangon bagi pekerja yang di PHK
- 568 Kesejahteraan Pekerja/Buruh
 - .1 Bantuan Kredit/bantuan modal kerja bagi tenaga kerja
 - .11 Pemilihan Pekerja Teladan
 - .2 Perumahan Pekerja
 - .3 Keikutseraan Pekerja Dalam Program Jamsostek
 - .4 Koperasi Pekerja
 - .5 Perpustakaan Pekerja
 - .6 Tempat Ibadah Pekerja
 - .7 Rekreasi dan Olahraga Pekerja
 - .8 Lembaga Kerjasama Bipartit
- 569 Tenaga Kerja Orang Asing
 - .1 Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Kerja (IKTA)
 - .2 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
 - .3 Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
 - .4 Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing
 - .5 Data Tenaga Kerja Asing
 - .6 Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing, Perselisihan Dan Pengaduan tenaga kerja Asing.
 - .7 Pemulangan Tenaga Kerja Asing
 - .8 Pemberdayaan dan kontribusi Tenaga Kerja Asing
 - .9 Tenaga Kerja Asing Ilegal
- 570 PERMODALAN
- 571 Modal Domestik
- 572 Modal Asing
 - .1 Kerjasama penanaman Modal Antar Provinsi

- .2 Kerjasama Penanaman Modal Antar Kabupaten/Kota
- 573 Modal Patungan (Joint Venture) Penyertaan Modal
- 574 Pasar Uang Dan Modal
- 575 Saham
- 576 Belanja Modal
- 577 Modal Daerah
- 578 Bursa Efek
- 579 Obligasi
- 580 PERBANKAN/MONETER
- 581 Kredit
- 582 Investasi
- 583 Tabungan; Pembukaan, Penutupan rekening, Deposito
 - .1 Deposito
 - .2 Tabanas
 - .3 Rekening
 - .4 Hadia Tabungan
- 584 Bank Pembangunan Daerah/Lembaga Perbankan
 - .1 Bank Pemereintah
 - .2 Lembaga Perbankan Daerah
 - .21 Lembaga Keuangan Kecamatan
 - .22 BPR
 - .3 Bank Swasta
 - .4 Bank Syariah
- 585 Asuransi Dana kecalakaan lalulintas
 - .1 Polis
 - .2 Premi
 - .3 Tertanggung/Pemegang Polis
 - .4 Uang Pertanggungan
- 586 Alat Pembayaran Cek, giro, wesel, transfer
- 587 Fiskal
- 588 Hutang Negara
- 589 Moneter
- 590 AGRARIA
- 591 Tataguna Tanah
 - .1 Pemetaan dan Pengukuran
 - .2 Perpetaan
 - .3 Penyediaan Data, Peta dab :Publikasi
 - .4 Fatwa Tataguna Tanah
 - .5 Tanah Kritis
- 592 Landeform
 - .1 Redistribusi
 - .11 Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan Tanah Pertanian
 - .12 Penentuan Tanah Obyek Landreform
 - .13 Pembagian Tanah Obyek Landreform
 - .14 Sengketa Radistribusi tanah Obyek Landreform
 - .2 Ganti Rugi
 - .21 Ganti Rugi Tanah Kelebihan
 - .211 Sengketa Ganti Tanah Kelebihan

- .22 Ganti Rugi Tanah Absentee
- .23 Ganti Rugi Tanah Partikelir
- .3 Bagi Hasil
 - .31 Penetapan Imbangan Bagi Hasil
 - .32 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
 - .33 Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
- .4 Gadai Tanah
 - .41 Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah
 - .42 Pelaksanaan Gadai Tanah
 - .43 Sengketa Gadai Tanah
- .5 Bimbingan dan Penyuluhan
- .6 Pengembangan
- .7 Yayasan Dana Lanreform (YDL)
- 593 Pengurusan Hak- hak Tanah
 - .1 Sewa Tanah
 - .11 Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu: Tebu, Tambakau Rosela, Corchrus
 - .2 Hak Milik
 - .21 Perorangan
 - .22 Badan Hukum
 - .3 Hak Pakai
 - .31 Perorangan
 - .311 Warga Negara indonesia
 - .312 Warga Negara Asing
 - .32 Badan Hukum
 - .321 Badan Hukum Indonesia
 - .322 Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang Asing
 - .33 Tanah Gedung- Gedung Negeri
 - .4 Guna Usaha
 - .41 Perkebunan Besar
 - .42 Perkebunan Rakyat
 - .43 Peternakan
 - .44 Perikanan
 - .5 Hak Guna Bangunan
 - .51 Perorangan
 - .52 Badan Hukum
 - .6 Hak Pengelolaan
 - .61 PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate
 - .62 Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
 - .7 Sengketa
 - .71 Peradilan Perkara Tanah (Lihat juga 183)
 - .8 Pencabutan Dan Pembebasan Tanah
 - .81 Pencabutan Hak
 - .82 Pembebasan Tanah
 - .83 Ganti Rugi Tanah
- 594 Pendaftaran Tanah
 - .1 Pengukuran / Pemetaan

.11	Fotogrametri
.12	Teristris
.13	Triangulasi
.14	Peralatan
.2	Dana Pengukuran
.3	Sertifikat
.4	Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
595	Tanah Untuk Transmigrasi
.1	Tata Guna Tanah
.2	Landerform
.3	Pengurusan Hak- Hak Tanah
.4	Pendaftaran Tanah
596	-
597	-
598	-
599	-

600

PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
601	Tata Bangunan, Konstruksi, Industri Konstruksi
si602	Kontraktor Pemborong
.1	Tender
.2	Penunjukan
.3	Prakualifikasi
.31	Daftar Rekanan Mampu
.32	Tanda Daftar Rekanan
603	Arsitektur
604	Bahan Bangunan
.1	Tanah dan Batu (seperti: Batu Belah, Steen slag, Solit, Pasir, Koral Lempung, Kapur, Marmer)
.2	Aspal
.3	Besi dan Logam lainnya
.31	Besi Beton
.32	Besi Profil (kontruksi)
.33	Baja
.34	Paku
.35	Aluminium Profil
.4	Bahan-bahan Pelindung dan pengawet (Cat, Pengawet Kayu)
.5	Semen
.6	Kayu (Seperti : Balog, Papan, Dolken, Plywood, Gabus dan sebagainya)
.7	Bahan Penutup Atap (Genteng, Asbes Gelombang, Seng dan sebagainya)
.8	Alat-alat Pengantung dan pengunci
.9	Bahan-bahan Bangunan Lainnya
605	Instalasi
.1	Instalasi Bangunan
.2	Instalasi Listrik
.3	instalasi air/sanitasi
.4	Instalasi pangatur Udara
.5	Instalasi Akustik
.6	Istalasi cahaya/penerangan
606	Konstruksi Pencegahan
.1	Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran
.2	Terhadap Gempa
.3	Terhadap Angin/Udara/Panas
.4	Terhadap Kegaduhan
.5	Terhadap Gas/Eksplosive
.6	Terhadap serangga
.7	Terhadap Radiasi atom
607	-
608	-
609	-

610	PENGAIRAN
611	Irigasi
.1	Bangunan Waduk
.11	Bendungan
.12	Tanggul
.13	Pelimpahan Banjir
.14	Menara Pengambilan
.2	Bangunan Pengambilan
.21	Bendungan
.22	Bendungan Dengan Pintu Bilas
.23	Bendungan Dengan Pompa
.24	Pengambilan Bebas
.25	Pengambilan Bebas Dengan Pompa
.26	Sumur Dengan Pompa
.27	Kantung Lumpur
.28	Slit Ekstraktor
.29	Escope chanel
.3	Bangunan Pembawa
.31	Saluran
.311	Saluran Induk
.312	Saluran Sekunder
.313	Susplesi
.314	Tersier
.315	Saluran Kwarter
.316	Saluran Pasangan
.317	Saluran Tertutup/Terowongan
.32	Bangunan
.321	Bangunan Bagi
.322	Bangunan Bagi dan Sedap
.323	Bangunan Sedap
.324	Bangunan Check
.325	Bangunan Terjun
.33	Box Tersier
.34	Got Miring
.35	Talang
.36	Syphon
.37	Gorong-Gorong
.38	Pelimpahan Samping
.4	Bangunan Pembuang
.41	Saluran
.411	Saluran Pembuang Induk
.412	Saluran Pembuang Sekunder
.413	Saluran Pembuang Tersier
.42	Bangunan
.421	Bangunan Out Let
.422	Bangunan Terjun
.423	Bangunan Penahan Banjir
.43	Gorong-gorong Pembuang

.44	Talang Pembuang
.45	Syphon Pembuang
.5	Bangunan Lainnya
.51	Jalan
.511	Jalan Inspeksi
.512	Jalan Logistik
.52	Jembatan
.521	Jembatan Inspeksi
.522	Jembatan Hewan
.53	Tangga Cuci
.54	Kubangan Kerbau
.55	Waduk Lapangan
.56	Bangunan Penunjang
.57	Jaringan Telepon
.58	Stasiun Agro
612	Folder
.1	Tanggul Keliling
.11	Bangunan Penutup Sungai
.12	Bangunan Penutup Sungai
.13	Jembatan
.2	Bangunan Pembawa
.21	Saluran
.211	Saluran Muka
.212	Saluran Pembawa Induk
.213	Saluran Sekunder
.22	Stasiun Pompa Pemasukan
.23	Bangunan Bagi
.24	Gorong-Gorong
.25	Syphon
.3	Bangunan Pembuang
.31	Stasiun Pompa Pembuang
.32	Saluran
.321	Saluran Pembuangan Induk
.322	Saluran Pembuangan Sekunder
.33	Pintu Air Pembuangan
.34	Gorong-Gorong Pembuangan
.35	Syphon Pembuangan
.4	Bangunan Lainnya
.41	Bangunan
.411	Bangunan Pengukur Air
.412	Bangunan Pengukur Curah Hujan
.413	Bangunan Gudang Stasiun Pompa
.414	Bangunan Listrik Stasiun Pompa
.42	Rumah Petugas Eksploitasi
613	Pasang Surut
.1	Bangunan Pembawa
.11	Saluran
.111	Saluran Pembawa Induk
.112	Saluran Pembawa Sekunder

- .113 Saluran Pembawa Tersier
- .114 Saluran Penyimpan Air
- .115 Bangunan Pintu Pemasukan
- .2 Bangunan Pembuangan
 - .21 Saluran
 - .211 Saluran Pembuangan Induk
 - .212 Saluran Pembuangan Sekunder
 - .213 Saluran Pembuangan Tersier
 - .214 Saluran Pengumpulan Air/Penyimpanan Air
 - .22 Bangunan Pintu Pembuangan
- .3 Bangunan Lainnya
 - .31 Kolam Lainnya/Pasang
 - .32 Saluran
 - .321 saluran lalulintas
 - .322 Saluran Muka
 - .33 Bangunan
 - .331 Bangunan Penangkis Kotoran
 - .332 Bangunan Pengukur Muka Air
 - .333 Bangunan Pengukur Curah Hijau
 - .34 Jalan
 - .35 Jembatan
- 614 Pengendalian Sungai
 - .1 Bangunan Pengamanan
 - .11 Tanggul Banjir
 - .12 Pintu Pengatur Banjir
 - .13 Klep Pengatur Banjir
 - .14 Tembok Pengaman Talud
 - .15 Krib
 - .16 Kantong Lumpur
 - .17 chek Dam
 - .18 Syphon
 - .2 Saluran Pengaman
 - .21 Saluran Banjir
 - .22 Saluran Drainage
 - .23 Courpore
 - .3 Bangunan Lainnya
 - .31 Warning Sistem
 - .32 Stasiun
 - .321 Stasiun Pengukur Hujan
 - .322 Stasiun Pengukur Hujan
 - .323 Stasiun Pengukur Cuaca
 - .324 Stasiun Pos Penjagaan
- 615 Pengaman Pantai
 - .1 Tanggul
 - .2 Krib
 - .3 Bangunan Lainnya
- 616 Air Tanah
 - .1 Stasiun Pompa
 - .2 Bangunan Pembawa

	.3	Bangunan Pembuang
	.4	Bangunan Lainnya
617	-	
618	-	
619	-	
620	JALAN	
621	Jalan Kota	
	.1	Daerah Penguasa
	.11	Tanah
	.12	Tanaman
	.13	Bangunan
	.2	Bangunan Sementara
	.21	Jalan Sementara
	.22	Jembatan Sementara
	.23	Kantor Proyek
	.24	Gudang Proyek
	.25	Barak Kerja
	.26	Laboratorium Lapangan
	.27	Rumah
	.3	Badan Jalan
	.31	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
	.32	Stabilitas
	.4	Perkerasan (Pavemen)
	.41	Lapisan Pondasi Bawah
	.42	Lapisan Pondasi
	.43	Lapisan Permukaan
	.5	Drainage
	.51	Parit Tanah
	.52	Gorong-Gorong
	.6	Buku Trotoir
	.61	Tanah
	.62	Perkerasan
	.63	Pasangan
	.7	Media/Medium
	.71	Tanah
	.72	Tanaman
	.73	Perkerasan
	.74	Pasangan
	.8	Daerah Samping
	.81	Tanaman
	.82	Pagar
	.9	Bangunan Pelengkapan dan Pengamanan
	.91	Rambu-rambu /tanda-tanda lalu lintas
	.92	Lampu Penerangan
	.93	Lampu Pengatur lalu lintas
	.94	Patok-patok KM
	.96	Rel Pengaman
	.97	Pagar
	.98	Turap Penahan

	.99	Bronjong
622		Jalur Luar Kota
	.1	Daerah Penguasaan
	.11	Tanah
	.12	Tanaman
	.13	Bangunan
	.2	Bangunan Sementara
	.21	Jalan Sementara
	.22	Jembatan Sementara
	.23	Kantor Proyek
	.24	Gudang Proyek
	.25	Barak Kerja
	.26	Laboratorium Lapangan
	.27	Rumah
	.3	Badan Jalan
	.31	Pekerjaan Tanah
	.32	Stabilisasi
	.4	Perkerasan (Pavement)
	.41	Lapisan Pondasi Bawah
	.42	Lapisan Pondasi
	.43	Lapisan Permukaan
	.5	Drainage
	.51	Parit
	.52	Gorong-gorong (Culvert)
	.53	Sub Drainage
	.6	Buku Trotoir
	.61	Tanah
	.62	Perkerasan
	.63	Pasangan
	.7	Median
	.71	Tanah
	.72	Tanaman
	.73	Perkerasan
	.74	Pasangan
	.8	Daerah Samping
	.81	Tanaman
	.9	Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
	.91	Rambu-rambu / tanda-tanda Lalu lintas
	.92	Lampu Penerangan
	.93	Lampu Pengatur lalu lintas
	.94	Patok-patok KM
	.95	Patok-patok ROW (Sempadan)
	.96	Real Pengaman
	.97	Pagar
	.98	Turap Penahan
	.99	Bronjong
623		Pengaspalan
624		Pembetonan
625		Hotmix

626	-
627	-
628	-
629	-
630	JEMBATAN
631	Jembatan Pada Jalan Kota
.1	Daerah Penguasaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan Sementara
.21	Jalan Sementara
.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gudang Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah
.3	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
.31	Galian Tanah
.32	Timbunan Tanah
.4	Pondasi
.41	Pondasi Kepala Jembatan
.42	Pondasi Pilar
.43	Pondasi Angker
.5	Bangunan Bawah
.51	Kepala Jembatan
.52	Pilar
.53	Piloon
.54	Landasan
.6	Bangunan
.61	Gelagar
.62	Lantai
.63	Perkerasan
.64	Jalan Orang (Trotoir)
.65	Sandaran
.66	Talang Air
.7	Bangunan Pengamanan
.71	Turap/Penahan
.72	Bronjong
.73	Strek Dam
.74	Kiset Dam
.75	Corpure
.76	Krib
.8	Bangunan Pelengkap
.81	Rambu-rambu /tanda-tanda lalu lintas
.82	Lampu Penerang
.83	Lampu Pengaturan Lalu lintas
.84	Patok Pengaman

.85	Patok Row (Sempadan)
.86	Pagar
.9	Sprit (Oprit)
.91	Badan
.92	Perkerasan
.93	Drainage
.94	Buku
.95	Median
632	Jembatan Pada Jalan Luar kota
.1	Daerah Penguasa
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan Sementara
.21	Jalan Sementara
.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gudang Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah
.3	Pekerjaan Tanah
.31	Galian Tanah
.32	Timbunan
.4	Pondasi
.41	Pondasi Kepala Jembatan
.42	Pondasi Pilar
.43	Pondasi Angker
.5	Bangunan Bawa
.51	Kepala Jembatan
.52	Pilar
.53	Piloon
.54	Landasan
.6	Bangunan Atas
.61	Gelagar
.62	Lantai
.63	Perkerasan
.64	Jalan Orang (Trotoir)
.65	Sandaran
.66	Talang Air
.7	Bangunan Pengaman
.71	Turap/Penahan
.72	Brojong
.73	Strek Dam
.74	Kiset Dam
.75	Courpore
.76	Krib (Kriup)
.8	Bangunan Pelengkap
.81	Rambu-rambu /tanda-tanda Lalu lintas

.82	Lampu Penerang
.83	Lampu Pengatur Lalu lintas
.84	Pertokoan Pengaman
.85	Potok Row (sempadan)
.86	Pagar
.9	Sprit/Oprit
.91	Badan
.92	Perkerasan
.93	Drainage
.94	Bahu
.95	Median
633	-
634	-
635	-
636	-
637	-
638	-
639	-
640	BANGUNAN
641	Bangunan Pemerintah
.1	Gedung Penagdilan
.2	Rumah Pejabat Negara
.3	Gedung DPRD
.4	Gedung Balai Kota
.5	Penjara
.6	Perkantoran
.7	Gedung Lainnya
642	Bangunan Pendidikan
.1	Taman Kanak-kanak
.2	SD Sekolah Menengah
.3	Perguruan Tinggi
643	Bangunan Rekreasi
.1	Bangunan Olahraga
.2	Gedung Kesenian
.3	Gedung Pemancar
.4	Gedung Lainnya
644	bangunan Perdagangan
.1	Pusat Perbelanjaan
.2	Gedung Perdagangan
.3	Bank
.4	Perkantoran dan lain-lain
645	bangunan Pelayanan Umum
.1	Mandi, Cuci , Kakus (MCK) Umum
.2	Gedung Parkir
.3	Rumah Sakit
.4	Gedung Telkom
.5	Terminal Angkatan Udara
.6	Terminal Angkutan Air

- .7 Terminal Angkutan Darat
- .8 Bangunan Keagamaan
- .9 Bangunan Lainnya
- 647 Bangunan Peninggalan Sejarah
 - .1 Monumen
 - .2 Candi
 - .3 Keraton
 - .4 Rumah Tradisional
 - .5 Rumah lainnya
- 647 Bangunan Industri
- 648 Bangunan Tempat Tinggal
 - .1 Rumah Perkotaan
 - .11 Inti/Sederhana
 - .12 Sedang/Mewah
 - .2 Rumah Pedesaan
 - .21 Rumah contoh
 - .3 Real Estate
 - .31 Rumah BTN
 - .32 Rumah Perumnas
- 649 Elemen Bangunan
 - .1 Pondasi
 - .11 Diatas Tiang
 - .2 Dinding
 - .21 Penahan Beban
 - .22 Tidak Menahan Beban
 - .3 Atap
 - .31 Atap Genting
 - .32 Atap Asbes
 - .33 Atap Seng
 - .4 Lantai/Langit-langit
 - .41 Suspended
 - .42 Solit
 - .5 Pintu/Jendela
 - .51 Pintu Harmonik
 - .52 Pintu Biasa
 - .53 Pintu Sorok (Sorong)
 - .54 Jendela Kayu
 - .55 Jendela Sorok (Sorong)
 - .56 Jendela Vertikal
- 650 TATA KOTA
- 651 Daerah Perdagangan/Pelabuhan
 - .1 Daerah Pusat Perbelanjaan
 - .2 Daerah Perkotaan
- 652 Daerah Pemerintahan
- 653 Daerah Perumahan (*Site dan Service*)
 - .1 Kepadatan Rendah (*Low Density*)
 - .2 Kepadatan Tinggi (*High Density*)
- 654 Daerah Industri
 - .1 Industri Berat

- .2 Industri Ringan
- .3 Industri Rumah (*Home Industry*)
- 655 Daerah Rekreasi
 - .1 Taman Kota (*Public garden*)
 - .2 *Sport and Playing Fields*
 - .3 *Open Space*
- 656 Transportasi
 - .1 Jaringan Jalan
 - .11 Penerangan Jalan
 - .2 Jaringan Kereta Api
 - .3 Jaringan Sungai
- 657 Assaineering
 - .1 Saluran Pengumpulan
 - .2 Saluran Pengolahan
 - .21 Bangunan
 - .211 Bangunan Penyaring
 - .212 Bangunan Penghancur Kotoran/sampah
 - .213 Bangunan Pengendapan
 - .214 Bangunan Pengering Lumpur
 - .22 Unit Desinfektan
 - .23 Unit Pemompaan
- 658 Kesehatan Lingkungan
 - .1 Persampahan
 - .11 Bangunan Pengumpul
 - .12 Bangunan Pemusnahan
 - .2 Pengotoran Udara
 - .3 Pengotoran Air
 - .31 Air Buangan Industri/Limbah
 - .4 Kegaduhan
 - .5 Kebersihan Kota
- 659 -
- 660 TATA LINGKUNGAN
 - .1 Lingkungan Hidup
 - .2 Kebersihan Lingkungan
 - .3 Pencemaran
 - .31 Pencemaran Air
 - .32 Pencemaran Udara
 - .33 Pencemaran Limbah B3
- 661 Daerah Hutan
- 662 Daerah Pertanian/Perkebunan
- 663 Daerah Pemukiman
- 664 Pusat Pertumbuhan
- 665 Transportasi
 - .1 Jaringan Jalan
 - .2 jaringan Kereta Api
 - .3 Jaringan Sungai
- 666 -
- 667 -
- 668 -

669	-
670	KETENANGAN
671	Listrik
.1	Kelistrikan
.11	Kelistrikan PLN
.12	Kelistrikan Non PLN
.2	Pembangkit Tenaga Listrik
.21	PLTA - Pembangkit Listrik Tenaga Air
.22	PLTD - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
.23	PLTG - Pembangkit Listrik Tenaga Gas
.24	PLTM - Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
.25	PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Nugri
.26	PLTPB - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
.27	PLTU - Pembangkit Listrik Tenaga Uap
.28	Pembangkit Listrik Tenaga lainnya
.3	Transmisi Tenaga Listrik
.31	Gardu Induk/Gardu Penghubung/Gardu Trafo
.32	Saluran Udara Tegangan Tinggi
.33	Kabel Bawah Tanah
.34	Kabel Bawah Laut/Air
.4	Distribusi Tenaga Listrik
.41	Gardu Distribusi
.42	Tegangan Rendah
.43	Tegangan Menengah
.44	Tegangan Tinggi
.45	Jaringan Bawah Tanah
.5	Penguasaan Listrik
.51	Sabungan Listrik
.52	Penjualan Tenaga Listrik
.53	Tarif Listrik
.54	Instalatur Listrik
672	Tenaga Air
673	Tenaga Minyak
674	Tenaga Gas
675	Tenaga Matahari
676	Tenaga Nuklir
677	Tenaga Panas Bumi
678	Tenaga Uap
679	Tenaga Lainnya
680	PERALATAN
681	Peralatan Berat
682	Peralatan Ringan
683	-
684	-
685	-
686	-
687	-
688	-
689	-

690	AIR MINUM
691	Intake
	.1 Broncaptering
	.2 Sumur
	.21 Sumur Pompa
	.22 Sumur Artesis
	.3 Bendungan
	.4 Saringan (<i>Screen</i>)
	.5 Pintu Air
	.6 Saluran Pembawa
	.7 Alat Ukur
	.8 Perpompaan
692	Tranmisi Air Beku
	.1 Perpipaan
	.2 Katup Udara (<i>Air Relief</i>)
	.3 Kutup Penguras (<i>Blow Off</i>)
	.4 Bak Pelepas Tekanan
	.5 Jembatan Pipa
	.6 Syphon
693	Instalasi Pengelolaan
	.1 Bangunan Ukur
	.2 Bangunan Areasi
	.3 Bangunan Pengendapan
	.4 Bangunan Penyuluh Bahan Kimia
	.5 Bangunan Pengaduk
	.6 Banguan Saringan
	.7 Perpompaan
	.8 <i>Cear Hell</i>
694	Distribusi
	.1 Reservoir Menara Bawah Tanah
	.11 Menara
	.12 Reservoir Dibawah Tanah
	.2 Perpipaan
	.3 Perpompaan
	.4 Jembatan Pipa
	.5 Syphon
	.6 Hydran
	.61 Hydran Umum
	.62 Hydran Kebakaran
	.7 Katup
	.71 Katup Udara (<i>Air Relief</i>)
	.72 Kutup Pelepas (<i>Blow off</i>)
	.8 Bak Pelepas Tekanan (<i>Pressure Raducing Valve</i>)
695	Perusahaan Daerah Air Minum
696	-
697	-
698	-
699	-

700
PENGAWASAN

700	PENGAWASAN
701	Bidang Urusan Dalam
702	Bidang Peralatan
703	Bidang Kekayaan Daerah
704	Bidang Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan/Sandi
705	Bidang Perencanaan
706	Bidang Organisasi
707	Bidang Penelitian
708	Bidang Konferensi
709	Bidang Perjalanan Dinas
710	BIDANG PEMERINTAHAN
711	Bidang Pemerintahan Pusat
712	Bidang Pemerintahan Provinsi
713	Bidang Pemerintahan Kabupaten/Kota
714	Bidang Pemerintahan Desa
715	Bidang MPR/DPR
716	Bidang DPR Provinsi
717	Bidang DPR Kabupaten/Kota
718	Bidang Hukum
719	Bidang Hubungan Luar Negeri
720	BIDANG POLITIK
721	Bidang Kepartaian
722	Bidang Organisasi Kemasyarakatan
723	Bidang Organisasi Profesi Dan Fungsional
724	Bidang Organisasi Pemuda
725	Bidang Organisasi Buruh, Tani, Dan Nelayan
726	Bidang Organisasi Wanita
727	Bidang Pemilihan Umum
728	-
729	-
730	BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN
731	Bidang Pertahanan
732	Bidang Kemiliteran
733	Bidang Perlindungan Masyarakat
734	Bidang Keamanan
735	Bidang Kejahatan
736	Bidang Bencana
737	Bidang Kecelakaan
738	-
739	-
740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
741	Bidang Pembangunan Desa
742	Bidang Pendidikan
743	Bidang Kebudayaan
744	Bidang Kesehatan
745	Bidang Agama

746	Bidang Sosial
747	Bidang Kependudukan
748	Bidang Media Massa
749	-
750	BIDANG PEREKONOMIAN
751	Bidang Perdagangan
752	Bidang Pertanian
753	Bidang Perindustrian
754	Bidang Pertambangan/Kesamudraan
755	Bidang Perhubungan
756	Bidang Tenaga Kerja
757	Bidang Permodalan
758	Bidang Perbankan/Moneter
759	Bidang Agraria
760	BIDANG PEKERJAAN UMUM
761	Bidang Pengairan
762	Bidang Jalan
763	Bidang Jembatan
764	Bidang Bangunan
765	Bidang Tata Kota
766	Bidang Lingkungan
767	Bidang Ketenangan
768	Bidang Peralatan
769	Bidang Air Minum
770	-
771	-
772	-
773	-
774	-
775	-
776	-
777	-
778	-
779	-
780	BIDANG KEPEGAWAIAN
781	Bidang Pengadaan Pegawai
782	Bidang Mutasi Pegawai
783	Bidang Kedudukan Pegawai
784	Bidang Kesejahteraan Pegawai
785	Bidang Cuti
786	Bidang Penilaian
787	Bidang Tata Usaha Kepegawaian
789	Bidang Pemberhentian Pegawai
790	BIDANG KEUANGAN
791	Bidang Anggaran
792	Bidang Otorisasi
793	Bidang Verifikasi
794	Bidang Pembukuan
795	Bidang Perbendaharaan

796 Bidang Pembina Kebendaharaan
797 Bidang Pendapatan
798 -
799 Bidang Bendaharaan

KEPEGAWAIAN

- 800 KEPEGAWAIAN
Klasifikasi disini: Kebijakan Pegawai
- .1 Perencanaan
 - .2 Penelitian
 - .043 Pengaduan
 - .05 Tim
 - .07 Statistik
 - .08 Peraturan Perundang-Undangan
- 801 -
- 802 -
- 803 -
- 804 -
- 805 -
- 806 -
- 807 -
- 808 -
- 809 -
- 810 PENGADAAN
Meliputi: Lamaran, Pengujian Kesehatan, dan Pengangkatan Calon Pegawai
- 811 Lamaran
- .1 *Testing*
 - .2 *Screening*
 - .3 Panggilan
- 812 Pengujian Kesehatan
- 813 Pengangkatan Calon Pegawai
- .1 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan I
 - .2 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II
 - .3 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III
 - .4 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV
 - .5 Pengangkatan Calon Guru Inpres/Guru Bantu
- 814 Pengangkatan Lepas
- .1 Pengangkatan Tenaga Bulanan/Tenaga Kontrak
 - .2 Pengangkatan Tenaga Harian
 - .3 Pengangkatan Tenaga Pensiunan
- 815 -
- 816 -
- 817 -
- 818 -
- 819 -
- 820 MUTASI
Meliputi: Pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, Pemindahan, perlimpahan, datasering,tugas belanja, wajib militer, dan sebagainya
- 821 Pengangkatan
- .1 Pengangkatan menjadi Pegawai Tetap

- .11 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Golongan I
- .12 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Golongan II
- .13 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Golongan III
- .14 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Golongan IV
- .15 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil yang Cuti di luar tanggungan Negara
- .15 Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan dari jabatan,
- .2 Berita Acara Serah Terima Jabatan
- .21 Sekjen/Dirjen/Kabag
Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Pusat/
Sekretaris/Kepala Dinas/Asisten Sekwilda kepala
- .22 Bagian Kepala Sub Direktorat/Kepala
- .23 Bidang/Inspektur Pembantu Kepala Sub Bagian
Kepala Seksi/Kepala
- .24 Bidang/Pemeriksa
- .25 *Residen*/Pembantu Gubernur
- .26 Wedana/Pembantu Bupati
- .27 Camat
- .28 Lurah Administratif (Lurah Desa)
- .29 Jabatan Lainnya
- 822 Kenaikan Gaji Berkala
 - .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
- 823 Kenaikan Pangkat/Pengangkatan
 - .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
- 824 Pemindahan/Pelimpahan/Perbantuan
 - .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
 - .5 Lolos Butuh
- 825 Datasering dan Penempatan Kembali
- 826 Penunjukan Tugas Belajar
 - .1 Dalam Negeri
 - .2 Luar Negeri
 - .3 Tunjangan Belajar
 - .4 Penempatan Kembali
- 827 Wajib Belajar
- 828 Mutasi Pegawai Instansi Lain
- 829 -
- 830 KEDUDUKAN
Meliputi : Perhitungan Masa Kerja, Penyesuaian Pangkat/Gaji,
Penghargaan Ijazah dan Jenjang Pangkat

- 831 Perhitungan Masa Kerja
- 823 Penyesuaian Pangkat/Gaji
 - .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
- 833 Penghargaan Ijazah/ Penyesuaian
- 834 Jenjang Pangkat/ Eselonering
- 835 -
- 836 -
- 837 -
- 838 -
- 839 -
- 840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI
 - .1 Meliputi: Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan, Koperasi, Distribusi, Perumahan/Tanah, Bantuan Sosial, Rekreasi dan Dispenasasi
- 841 Tunjangan
 - .1 jabatan
 - .2 Kehormatan
 - .3 Kematian/Uang Duka
 - .4 Tunjangan Hari Raya
 - .5 Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah
 - .6 Keluarga
 - .7 Sandang, Pangan, Papan (Bapertarum)
- 842 Dana
 - .1 Taspen
 - .2 Kesehatan
 - .3 Asuransi
- 843 Perawatan Kesehatan
 - .1 Poliklinik
 - .2 Perawatan Dokter
 - .3 Obat-Obatan
 - .4 Keluarga Berencana
- 844 Koperasi/Distribusi
 - .1 Distribusi Pangan
 - .2 Distribusi Sandang
 - .3 Distribusi Papan
- 845 Perumahan/Tanah
 - .1 Perumahan Pegawai
 - .2 Tanah kapling
 - .3 Losmen/Hotel
- 846 Bantuan Sosial
 - .1 Bantuan Kebakaran
 - .2 Bantuan Kebanjiran
- 847 -
- 848 -
- 849 -
- 850 CUTI

- Meliputi: Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti sakit, Cuti Hamil, Cuti Naik Haji, Cuti diluar Tanggungan Negara dan Cuti Alasan Lain
- 851 Cuti Tahunan
- 852 Cuti Besar
- 853 Cuti Sakit
- 854 Cuti Hamil
- 855 Cuti Naik Haji/Umroh
- 856 Cuti Diluar Tanggungan Negara
- 857 Cuti Alasan Lain/Alasan Penting
- 858 -
- 859 -
- 860 PENILAIAN
Meliputi: Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian Dinas
penilaian Kekayaan Peibadi dan Rehabilitas
- 861 Penghargaan
- .1 Bintang/Satyalencana
- .2 Kenaikan Pangkat Anumerta
- .3 Kenaikan Gaji Istimewa
- .4 Hadia berupa Uang
- .5 Pegawai Teladan
- 862 Hukuman
- .1 Teguran Peringatan
- .2 Penundaan Kenaikan Gaji
- .3 Penurunan Pangkat
- .4 Pemindahan
- Catatan : Pemberhentian Untuk sementara waktu dan pemberitahuan Tidak dengan hormat lihat 887 dan 888
- 863 Konduite, DP3, Disiplin Pegawai
- 864 Ujian Dinas
- .1 Tingkat I
- .2 Tingkat II
- .3 Tingkat III
- 865 Penilaian Kehidupan Pegawai negeri
Meliputi: Petunjuk pelaksanaan hidup sederhana, penilaian kekayaan Pribadi (LP2P)
- 866 Rehabilitasi/Pengaktifan kembali
- 867 -
- 868 -
- 869 -
- 870 TATA USAHA PEGAWAIAN
Meliputi: Formasi, Bezetting, Registrasi, Daftar, Riwayat, Hak Penggajian, Sumpah/Janji dan Korps Pegawai
- 871 Formasi
- 872 Bezetting
- 873 Registrasi
- .1 Nip
- .2 KARPEG
- .3 Legitimasi/Tanda Pengenal
- .4 Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Karis, Karsu

- 874 Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan
 - .1 Tanggal Lahir
 - .2 Penggantian Nama
 - .3 Izin Keptartaian/Organisasi
- 875 Kewenangan Mutasi Pegawai
 - .1 Pelimpahan Wewenang
 - .2 Specing Tanda Tangan
- 876 Penggajian
 - .1 SKPP
- 877 Sumpah/Janji
- 878 Korps Pegawai
- 879 -
- 880 PEMBERHENTIAN
Meliputi Atasan Pemberhentian, permintaan sendiri, dengan hak pensiun Karena meninggal dunia, alasan lain, dengan diberi uang pesangon, uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian dengan tidak hormat
- 881 Pemintaan Sendiri
- 882 Dengan Hak Pensiun
 - .1 Golongan I
Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai golongan I
 - .2 Golongan 2
Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai Negeri golongan II
 - .3 Golongan 3
Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai Negeri golongan III
 - .4 Golongan 4
Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai Negeri golongan IV
 - .5 Pensiun Janda/Duda
 - .6 Pensiun Yatim Piatu
 - .7 Uang Muka Pensiun
 - .8 Pensiun Dini
- 883 Karena Meninggal
 - .1 Karena meninggal dalam tugas
- 884 Alasan Lain
- 885 Uang Pasangon
- 886 Uang Tunggu
- 887 Untuk sementara waktu
- 888 Tidak dengan hormat
- 889 -
- 890 PENDIDIKAN PEGAWAI
Meliputi: Perencanaan , Pendidikan Reguler, Pendidikan Non Reguler, Pendidikan ke Luar Negeri, Metode, Tenaga pengajar, Administrasi Pendidikan, Fasilitas Sarana Pendidikan
- 891 Perencanaan
 - .1 Program
 - .2 Kurikulum dan Silabi

- .3 Proposal (TOR)
- 892 Pendidikan Reguler/Kader
 - .1 IPDN/STPDN
 - .2 Kursus-Kursus Reguler
- 893 Pendidikan Dan Latihan/Non Reguler
 - .1 LEMHANAS Pendidikan dan Pelatihan Struktural, SPATI, SPAMEN
 - .2 SPAMA, ADUMLA, ADUM
 - .3 Kursus-kursus/Penataran
 - .4 Diklat teknik, Fungsional dan Manajemen Pemerintahan
 - .5 Diklat Lainnya
- 894 Pendidikan Luar Negeri
 - .1 Berkesinambungan/Berkala/Bergelar
 - .2 Non Gelar/Diploma
- 895 Metode
 - .1 Kuliah
 - .2 Ceramah, Simposium
 - .3 Diskusi, Raker, Seminar, Lokakarya, Orientasi
 - .4 Studi Lapangan. KKN, Widyawisata
 - .5 Tanya Jawab/Sylabi/Modul/Kursil
 - .6 Penugasan
 - .7 Gladi
- 896 Tenaga Pengajara/Widyaiswara/Narasumber
 - .1 Moderator
- 897 Administrasi Pendidikan
 - .1 Tahun Pelajaran
 - .2 Persyaratan, meliputi pendaftaran, testing, Ujian
 - .3 STTP
 - .4 Penilaian Angka kredit
 - .5 Laporan Pendidikan Dan Pelatihan
- 898 Fasilitas Belajar
 - .1 Tunjangan Belajar
 - .2 Asrama
 - .3 Uang Makan
 - .4 Uang Transport
 - .5 Uang Buku
 - .6 Uang Ujian
 - .7 Uang Semester/Uang kuliah
 - .8 Uang Saku
- 899 Sarana
 - .1 Bantuan Sarana Belajar
 - .2 Bantuan Alat- Alat Tulis
 - .3 Bantuan Sarana Belajar Lainnya.

900
KEUANGAN

900	KEUANGAN
901	Nota Keuangan
902	APBN
903	APBD
904	APBN-P
905	Dana Alokasi Umum
906	Dana Alokasi Khusus
907	Dekonsentrasi (Perlimpahan Dana Dari Pusat Ke Daerah)
908	-
909	-
910	ANGGARAN
911	Rutin/BTL
912	Pembangunan/BL
913	Anggaran Belanja Tambahan
914	Daftar isian Kegiatan (DIK)
.1	Daftar Usulan Kegiatan (DuK)
915	Daftar Isian Proyek (DIP)/DPA
.1	Daftar Usulan Proyek (DUP)/RKA
.2	Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)
916	Revisi Anggaran
917	-
918	-
919	-
920	OTORISASI/SKO
921	Rutin/BTL
922	Pembangunan/BL
923	SIAP
924	Ralat SKO
925	-
926	-
927	-
928	-
929	-
930	VERIFIKASI
931	SPM Rutin (Daftar P8)
932	SPM Pembangunan (Daftar P8)
933	Penerimaan (Daftar P6. P7)
934	SPJ Rutin/BTL
935	SPJ Pembangunan/BL
936	Nota Pemeriksa
937	SP Pemindahan Pembukuan
938	-
939	-
940	PEMBUKUAN
941	Penyusunan Perhitungan Anggaran

942	Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan
943	Laporan Fisik Pembangunan
944	-
945	-
946	-
947	-
948	-
949	-
950	PERBENDAHARAAN
951	Tuntutan Ganti Rugi (ICU Pasal 74)
952	Tuntutan Bendaharawan
953	Pennghapusan Kekayaan Negara
954	Pengangkatan/pergantian pimpinan proyek dan Pengangkatan/ pemberhentian bendaharawan
955	Specimen Tanda Tangan
956	Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan
957	-
958	-
959	-
960	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
961	Pemeriksaan Kas dan hasil Pemeriksaan Kas
962	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan
963	Laporan Keuangan Bendaharawan
964	-
965	-
967	-
968	-
969	-
970	PENDAPATAN
971	Perimbangan Keuangan
972	Subsidi
973	Pajak, Ipeda, IHH, IHPH
974	Retribusi
975	Bea
976	Cukai
977	Pungutan/PNBP
978	Bantuan Presiden, Mentari dan Bantuan lainnya
979	Pendapatan lainnya
.1	Hasil penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
.11	Pelepasan Hak Atas Tanah
.12	Penjualan Rumah Jabatan, Rumah Dinas
.13	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
.14	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
.15	Penjualan Bongkaran Bangunan Dan Inventaris
.16	Penjualan Drum Bekas
.17	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
.2	Penerimaan Jasa Giro
.21	Jasa Giro Kas Daerah
.22	Jasa Giro Pemegang Kas

.23	Jasa Giro Khusus
.3	Penerimaan Bunga Bank
.31	Bunga deposito
.32	Bunga Tabungan
.4	Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan Kekayaan daerah (TPTGR)
.41	Sumbangan Pihak Ketiga
.42	Sumbangan Pihak Ke Tiga Kendaraan (Dealer)
.43	Sumbangan Pihak Ke Tiga Kayu
.5	Penerima Lain-Lain
.51	Penerima Kembali Kredit BKK
.52	Ternak Tidak Layak Bibit
.53	Sewa Internet
.54	Penerimaan Dan Dana Bergulir
.55	Kerjasama Dengan Bumida
.56	Penerimaan DUKS
.57	Tempat Rekreasi Nusakembangan
.58	Setoran TPTGR
.59	Penerimaan Lainnya dari Setda/Dinas-Dinas
980	
981	
982	
983	
984	
985	
986	
987	
988	
989	
990	BENDAHARAWAN
991	SKPP/SPP
992	Teguran SPJ
993	-
994	-
995	-

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

 DR. ROBERT K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19650818 199203 1 022